



# Rancangan Perubahan **RENSTRA** BALITBANGDA

2019-2023



[balibangdaprov.kaltim](https://www.instagram.com/balibangdaprov.kaltim)



Balibangda Prov KT



[litbang.kaltimprov.go.id](http://litbang.kaltimprov.go.id)

## KATA PENGANTAR

**S**egala puji bagi Allah SWT yang telah memberi nikmat-Nya yang tak terhingga, sehingga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 dapat diselesaikan. Perubahan Renstra ini disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional serta perkembangan aktual dari isu-isu strategis di daerah.

**A**danya penetapan Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur, terbitnya UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, hingga telah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan *omnibus law*, tentunya akan banyak berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan Kaltim kedepan.

**N**antinya, Perubahan Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 yang telah memuat perubahan tujuan, sasaran, indikator sasaran dan perbaikan anggaran tahun 2021-2023 ini, menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja lingkup Balitbangda dalam melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan sistematis.

**I**nformasi yang disajikan dalam Perubahan Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran perencanaan serta upaya pencapaian kinerja kelitbang hingga akhir periode RPJMD.

Samarinda,                      April 2021  
Kepala,

Abdullah Sani, SH, M.Hum  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640101 199003 1028

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR .....	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
2.2. Sumber Daya.....	14
2.3. Kinerja Pelayanan Balitbangda Prov. Kaltim .....	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BALITBANGDA PROV. KALTIM .....	43
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD .....	43
3.2 Telaahan Renstra K/L dan RPJMD Provinsi .....	54
3.3 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	56
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.....	59
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	62
4.1 Tujuan .....	62
4.2 Sasaran.....	64
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	77
5.1 Strategi dan Kebijakan .....	77
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	81
6.1 Rencana Program dan Kegiatan .....	81

6.2	Pendanaan Indikatif .....	84
BAB VII	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN .....	89
BAB VIII	PENUTUP .....	91



## BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mengakomodir dinamika yang terjadi, dilakukan perubahan atas Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur untuk periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025 tahap keempat.

Penyusunan Perubahan Renstra Balitbangda Prov. Kaltim 2019-2023 mempertimbangkan rencana strategis penelitian dan pengembangan dari Kementerian terkait terutama Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri selaku pembina Balitbangda di Provinsi sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 yang kemudian diperbaharui dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Kementerian teknis yang ada di pusat yaitu Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
2. Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;



13. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi RI Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah;
19. Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2016-2036;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;



24. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan;
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur ;
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dalam menunjang optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan dan pembangunan selama periode tahun 2019-2023 yaitu:

1. Sebagai dokumen Rencana Strategis organisasi yang merupakan sebuah kerangka atau kesatuan konsep, prosedur dan alat yang direncanakan untuk pimpinan dan seluruh staf/pegawai secara sistematis, terarah, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan serta berpikiran dan bertindak strategis dalam melaksanakan tugas.
2. Sebagai pedoman dan bahan pertimbangan bagi pimpinan dan seluruh staf/pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023 adalah:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2019-2023.
2. Memberikan arahan bagi seluruh staf/pegawai Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan/melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang ingin dicapai dalam periode 2019-2023.
3. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh staf/pegawai dalam organisasi untuk menyusun rencana kerja organisasi serta penentuan pilihan-pilihan program

dan kegiatan tahunan organisasi yang terarah dan terpadu disertai dengan kerangka pembiayaannya.

4. Mengoptimalkan partisipasi seluruh staf/pegawai dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan organisasi.
5. Menetapkan komitmen kinerja (*performance agreement*) yang disepakati bersama antara staf/pegawai dan pimpinan, yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur/barometer kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban.

#### 1.4. Sistematika

Perubahan Rencana Strategis Balitbangda ini terdiri atas tujuh bab. Sistematika penulisannya dapat disajikan seperti berikut ini.

##### **BAB I      Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

##### **BAB II     Gambaran Pelayanan Balitbangda Prov. Kaltim**

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur yang di dalamnya memuat sumberdaya organisasi, kondisi capaian kinerja pelayanan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur 2018 dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Balitbangda.

##### **BAB III    Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Komponen Bab ini memuat permasalahan pokok berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan badan, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis

##### **BAB IV    Tujuan dan Sasaran**

Bab ini memuat tujuan dan sasaran Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

## **BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

## **BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Bab ini memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

## **BAB VII Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Bab ini memuat indikator kinerja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan serta sebagai alat ukur kinerja dalam pencapaian visi dan misi Balitbangda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

## **BAB VIII Penutup**

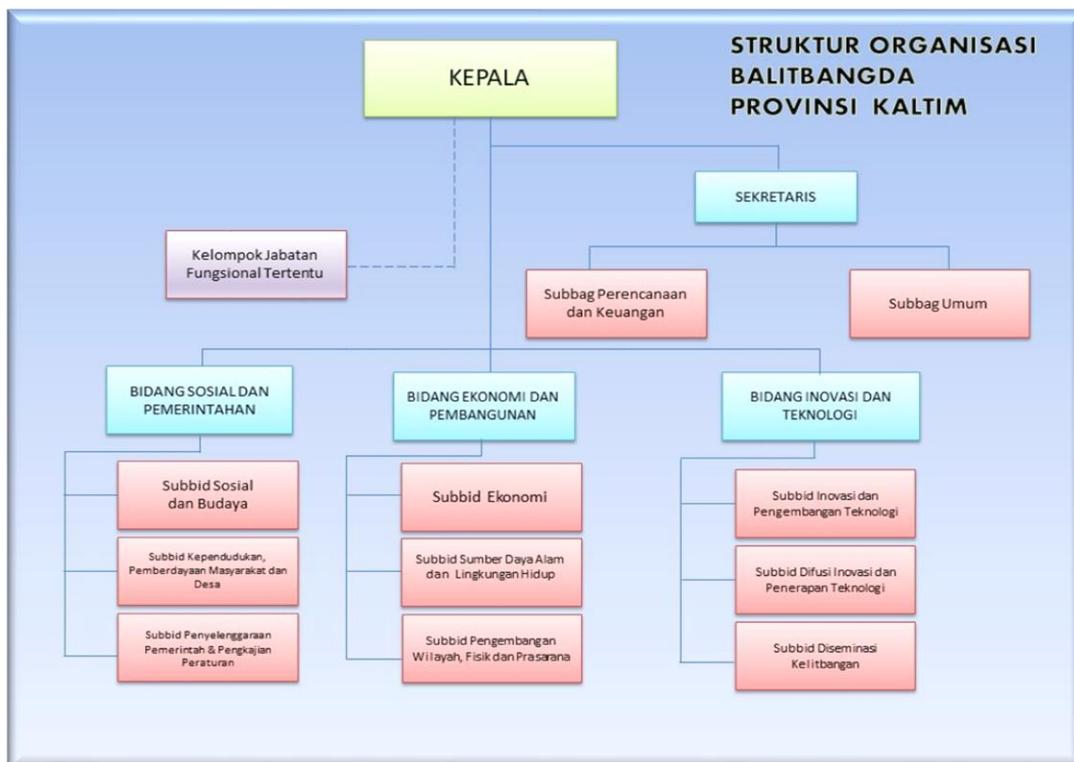
Bab ini merupakan penutup yang memuat harapan dan komitmen terhadap Renstra Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berada pada perangkat daerah tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang terdiri dari Kepala, Sekretaris, dan 3 (tiga) Bidang serta Rumpun Jabatan Fungsional Peneliti. Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Balitbangda Provisi Kalimantan Timur

Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dapat dikemukakan seperti berikut ini.

**Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur** mempunyai tugas : membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- 2) Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi;
- 3) Pelaksanaan kebijakan teknis sosial dan pemerintahan;
- 4) Pelaksanaan kebijakan teknis ekonomi dan pembangunan;
- 5) Pelaksanaan kebijakan teknis inovasi dan teknologi;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;
- 7) Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

1. **Sekretariat Badan** dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretaris membawahkan Subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi;

- 1) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris membawahi subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbagian dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.

- Subbagian perencanaan program dan keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan, anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.
- Subbagian umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

2. **Bidang Sosial dan Pemerintahan** dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Sosial dan Pemerintahan membawahkan Subbidang-Subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang. Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan penelitian pengembangan teknis di bidang Sosial dan Pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sosial dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sosial dan pemerintahan;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang sosial dan pemerinahan;
- 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang sosial budaya;
- 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sosial budaya, kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Balitbangda yang berkaitan dengan tugasnya.

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan membawahi subidang-subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada bidang sosial dan pemerintahan.

- Subbidang sosial dan budaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian penelitian dan pengembangan sosial dan budaya.
- Subbidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa.

- Subbidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan.

3. **Bidang Ekonomi dan Pembangunan** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Ekonomi dan Pembangunan membawahkan Subbidang-Subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang. Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian penelitian dan pengembangan teknis dibidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan;
- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program bidang ekonomi dan pembangunan;
- 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang penelitian dan pengembangan ekonomi;
- 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang penelitian dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang penelitian dan pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengembangan wilayah, fisik dan prasarana; dan

7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Balitbangda yang berkaitan dengan tugasnya.

Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan membawahi subbidang-subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada bidang ekonomi dan pembangunan.

- Subbidang ekonomi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian ekonomi.
- Subbidang sumber daya alam dan lingkungan hidup mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis, pengendalian penelitian dalam pengembangan sumber daya alam;
- Subbidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian penelitian dalam pengembangan wilayah, fisik dan prasarana.

4. **Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Inovasi dan Teknologi membawahkan Subbidang-Subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang. Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi..

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi :

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang inovasi dan teknologi;

- 2) Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program penelitian dan pengembangan;
- 3) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang inovasi dan pengembangan teknologi;
- 4) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
- 5) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbidang diseminasi kelitbangan;
- 6) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan inovasi dan pengembangan teknologi, difusi inovasi dan penerapan teknologi serta diseminasi kelitbangan; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Balitbangda yang berkaitan dengan tugasnya.

Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi membawahi subbidang-subbidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbidang dan bertanggungjawab langsung kepada bidang inovasi dan teknologi.

- Subbidang inovasi dan pengembangan teknologi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap inovasi dan pengembangan teknologi.
- Subbidang difusi inovasi dan penerapan teknologi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap difusi inovasi dan penerapan teknologi.
- Subbidang diseminasi kelitbangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap diseminasi kelitbangan.

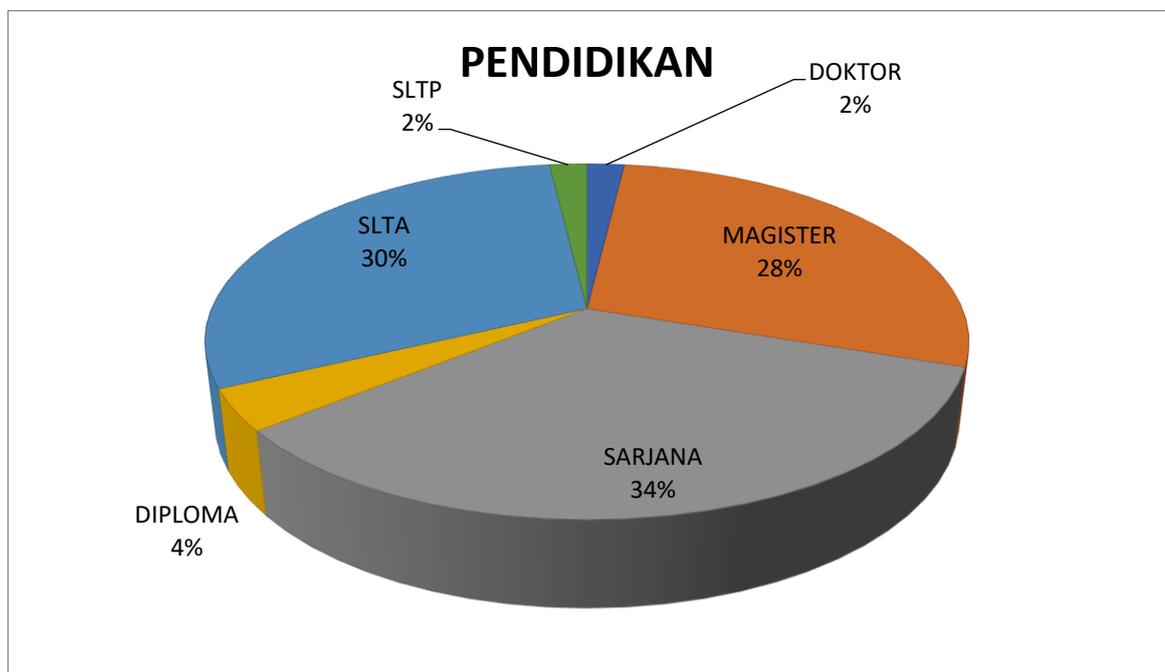
## 5. Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Peneliti (JFP)

Jabatan fungsional peneliti mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja atas usulan Kepala Balitbangda sesuai peraturan ketentuan

### 2.2. Sumber Daya

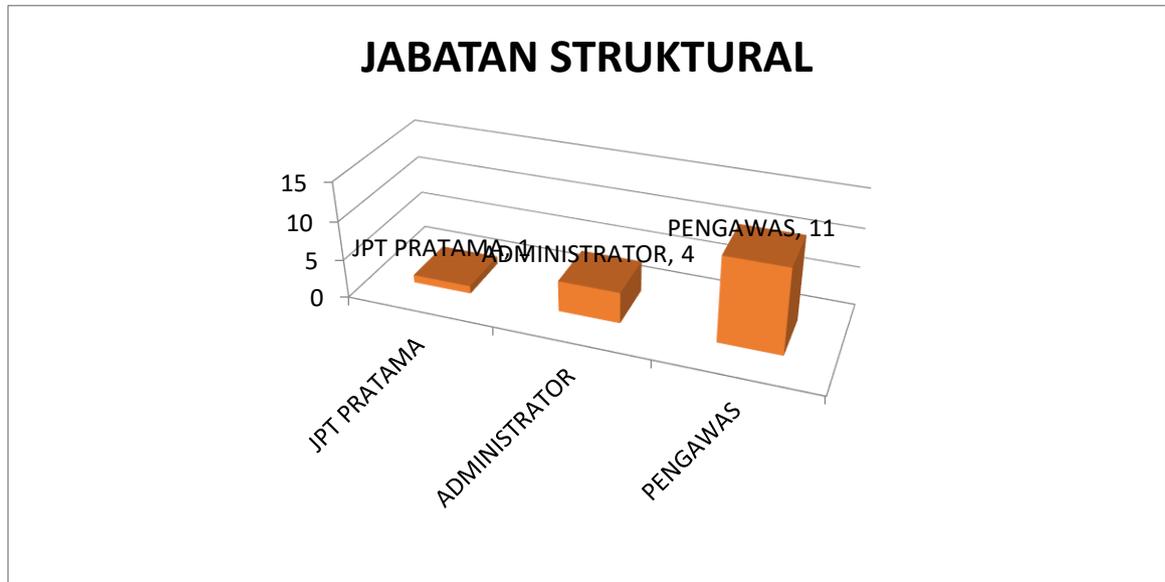
#### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan komposisi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2020 berjumlah 52 orang yang dirinci menurut pendidikan sebagaimana diagram Gambar 2.2. sebagai berikut :



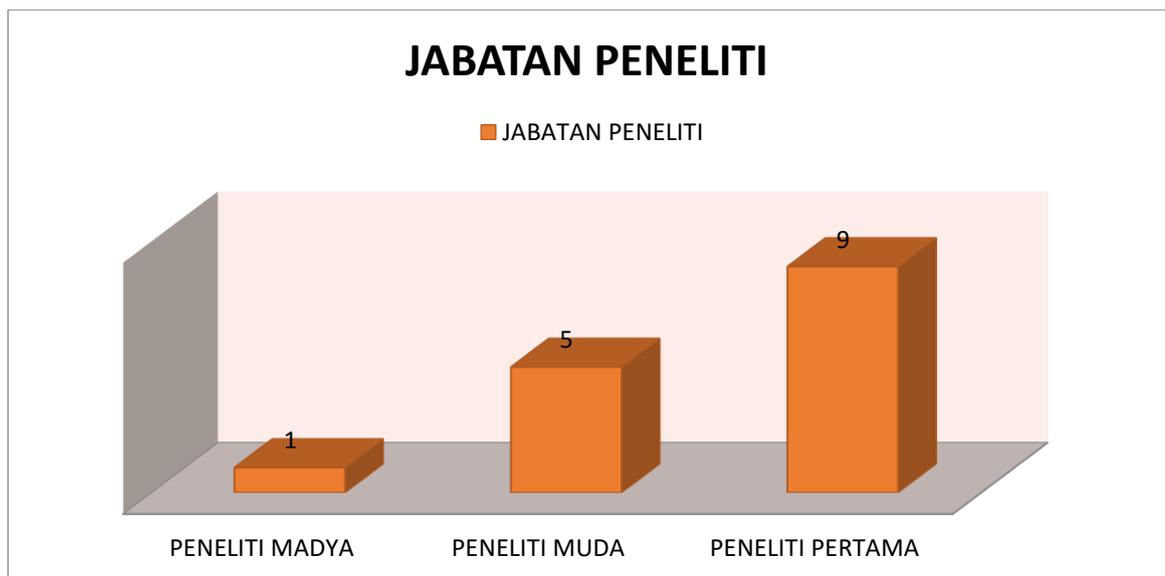
Gambar 2.2. Tingkat Pendidikan ASN Balitbangda Kaltim Tahun 2020

Adapun SDM Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan struktural berjumlah 13 orang dengan rincian sebagai berikut :



**Gambar 2.3** Jabatan Struktural Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2020

Sedangkan yang menduduki jabatan fungsional peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 15 orang dengan rincian sebagai berikut :



**Gambar 2.4.** Jabatan Fungsional Peneliti Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2020

Keahlian/kepakaran dari pejabat fungsional peneliti tersebut meliputi :

- Peneliti Madya : Manajemen Organisasi
- Peneliti Muda :
  1. Manajemen Sumber Daya Manusia
  1. Teknologi Transportasi Jalan
  2. Kebijakan Ekonomi
  3. Administrasi Publik
  4. Sistem Usaha Pertanian
- Peneliti Pertama :
  1. Kebijakan Publik
  2. Politik dan Pemerintahan
  3. Manajemen Sainifik
  4. Teknologi Kimia
  5. Hukum Administrasi Negara
  6. Kebijakan Lingkungan
  7. Manajemen Industri
  8. Kebijakan Publik
  9. Perencanaan Wilayah

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 53 orang dengan komposisi pangkat dan golongan/ruang sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Komposisi Pangkat dan Golongan/Ruang PNS dan PTT**  
**Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2020**

No	Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembina Utama Muda	IV/d	1
2	Pembina Utama Muda	IV/c	1
3	Pembina Tingkat I	IV/b	4
4	Pembina	IV/a	3
5	Penata Tingkat I	III/d	9
6	Penata	III/c	5
7	Penata Muda Tingkat I	III/b	16
8	Penata Muda	III/a	1



No	Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah
9	Pengatur Tingkat I	II/d	4
10	Pengatur	II/c	7
11	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1
12	Juru Tingkat I	I/d	1
<b>Jumlah</b>			<b>53</b>

### Kebutuhan SDM kedepan

Berdasarkan dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja tahun 2020, kondisi SDM di Balitbangda masih memerlukan penambahan personel berstatus ASN.

Saat ini kebutuhan ASN tersebut dipenuhi dengan pemberdayaan Tenaga Alih Daya (TAD) melalui proses perekrutan dan sistem kontrak.

Kebutuhan ASN berdasarkan ANJAB/ABK adalah sebagai berikut :

No.	Satker	Kebutuhan Pegawai ASN
1.	Sekretariat	
	Subbag Perencanaan dan Keuangan	5
	Subbag Umum	4
2.	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
	Subbidang Pengembangan Wilayah, Fisik, dan Prasarana	1
	Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1
3.	Bidang Inovasi dan Teknologi	
	Subbidang Difusi Informasi dan Penerapan Teknologi	1
4.	Bidang Sosial dan Pemerintahan	
	Subbidang Sosial Budaya	1
	<b>Jumlah</b>	<b>13</b>

## 2.2.2 Asset/Modal

**Tabel 2.2.**  
**Jumlah Aset/Modal Balitbangda Prov. Kaltim Tahun 2020**

ASET MODAL	
Tanah	0.00
Peralatan dan Mesin	0.00
Gedung dan Bangunan	24,900,000.00
Jalan, Jaringan dan Instalasi	0.00
Aset Tetap Lainnya	0.00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0.00
Akumulasi Penyusutan	0.00
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>24,900,000.00</b>

## 2.2.3 Unit Usaha yang Masih Operasional

Unit usaha yang ada untuk menunjang fungsi Badan litbang adalah sebagai berikut :

- 2.2.2.1 Bangunan kantor Balitbangda
- 2.2.2.2 Ruang seminar, diskusi, persentasi dan lain-lain dilengkapi *meubelair* dan *Audio Visual System*
- 2.2.2.3 Ruang rapat staf lengkap dengan *meubelair*
- 2.2.2.4 Ruang Perpustakaan
- 2.2.2.5 Ruang Peneliti
- 2.2.2.6 Ruang Diseminasi Kelitbangan
- 2.2.2.7 Ruang Satpam
- 2.2.2.8 Jaringan Internet
- 2.2.2.9 Gudang
- 2.2.2.10 Kendaraan Dinas roda empat dan roda dua
- 2.2.2.11 Notebook, PC dan Printer
- 2.2.2.12 Sarana Dokumentasi
- 2.2.2.13 Televisi.
- 2.2.2.14 Layar persentasi/LC
- 2.2.2.15 Sarana/prasarana lainnya dalam mendukung kegiatan administrasi dan penelitian

### 2.3 Kinerja Pelayanan Balitbangda Prov. Kaltim

Setiap tahun Balitbangda melakukan penilaian kinerja pelayanan sesuai perjanjian kinerja yang sudah ditetapkan sebelumnya. Menurut penilaian kinerja yang tertuang pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), secara umum Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dinilai sangat baik dalam mencapai sasaran strategis pembangunan bidang penelitian dan pengembangan daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Artinya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah telah mampu mencapai target Indikator Kinerja Utama yang tercantum pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada Renstra Badan. Hal ini tentu saja menjadi titik awal yang baik untuk penyusunan Renstra periode 2019-2023 sekarang ini.

#### Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019.

Pengukuran kinerja dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja melalui perbandingan antara rencana kerja dengan pencapaian realisasi. Pengukuran capaian kinerja ini berdasarkan dari Revisi perjanjian kinerja tahun 2019. Adapun hasil pengukuran kinerja kegiatan dengan nilai capaian untuk setiap indikator sebagaimana tabel berikut :

**Tabel Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas kelitbangan dalam mendukung pemerintahan daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	30	I			
					II			
					III			
					IV	30	22	73
2.	Meningkatnya ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) secara konsisten	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	30	I			
					II			
					III			
					IV	30	22	73
		Persentase kebijakan inovasi daerah yang diterapkan di daerah	%	30	I			
					II			
					III			
					IV	-	-	-

#### Analisis Capaian Kinerja



Analisis capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, realisasi kinerja dan hal-hal yang mendukung keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja.

**Sasaran Strategis 1 :**

Meningkatnya kualitas kelitbangan dalam mendukung pemerintahan daerah.

**Indikator Kinerja :**

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan diperoleh dari perhitungan jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang dihasilkan (9 Sub Bidang). Pada tahun 2019 ini realisasi diperoleh dari bidang inovasi dan teknologi yang terdiri dari :

- Hasil fasilitasi bidang IT Tahun 2019 ke Kab. Kutai Barat ditindaklanjuti melalui permohonan Kepala Balitbangda Provinsi Kaltim menjadi narasumber pada acara Sosialisasi Inovasi Daerah pada tanggal 03 Februari 2020 (1).
- Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 070/K.540/201 tentang pembentukan tim penjangkaran PD berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (2).
- Realisasi target diperoleh dengan nilai 22% ( $2/9 \times 100\%$ ), sehingga diperoleh capaian kinerja 73% ( $22/30 \times 100\%$ ).

**Sasaran Strategis 2 :**

Meningkatnya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) secara Konsisten

**Indikator Kinerja :**

- 1) Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah.
- 2) Persentase Kebijakan Inovasi Daerah yang Diterapkan Di Daerah

- Formulasi perhitungan dari indikator kinerja tersebut adalah jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah

- dibandingkan dengan jumlah total perangkat daerah di lingkungan prov/kab/kota.
- Realisasi kinerja sebesar 22% diperoleh dari perhitungan jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebanyak 12 PD dibandingkan dengan jumlah total perangkat daerah di lingkungan prov/kab/kota 55 PD dengan perhitungan ;  $12/55 \times 100\% = 22\%$ .
  - Untuk capaian kinerja diperoleh dari perhitungan ;  $(22\%)/\text{target kinerja (30\%)} = 73\%$ .
  - Capaian kinerja tersebut dinilai melalui Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh kegiatan sub bidang inovasi dan pengembangan teknologi yang berinovasi dengan kategori inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### Indikator kinerja 2 :

#### Persentase Kebijakan Inovasi Daerah yang Diterapkan Di Daerah

- Untuk indikator ini belum dapat direalisasikan sehingga capaian kerjanya 0%, karena proses rekomendasi untuk menjadi kebijakan harus menjalani beberapa tahapan yakni : penelitian–pengkajian–pengembangan–perekayasaan–pengoperasian–evaluasi kebijakan.
- Program dan kegiatan kelitbang yang dilaksanakan pada tahun 2019 ini berada pada tahapan pengkajian.

Analisis kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2019-2020 juga dapat dilihat dari tren peningkatan pembiayaan pembangunan bidang Litbang di Kalimantan Timur yang, pencapaian indikator kinerja sasaran tahun 2019-2020 yang hampir semua 100% serta kondisi umum bidang Litbang di Kalimantan Timur tahun 2019 yang berjalan sesuai tugas dan fungsinya. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2020 terlihat pada tabel 2.3 berikut :



Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)/2019	(7)/2020	(8)/2021	(9)/2022	(10)/2023	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang sosial dan pemerintahan				70%	80%	90%	95%	100%	91.15%									
	Jumlah laporan Litbang Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Yang Dilaksanakan				1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan									
	Jumlah laporan Litbang Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Yang Dilaksanakan				1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan									
	Jumlah laporan Litbang Sub Bidang Sosial Dan Budaya Yang Dilaksanakan				1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan									
	Jumlah laporan penelitian mandiri fungsional peneliti bidang sosial dan pemerintahan yang dilaksanakan				7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan									
	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang ekonomi dan pembangunan				70%	80%	90%	95%	100%	70%									



Jumlah Laporan Litbang Sub Bidang Ekonomi yang dilaksanakan				1 laporan														
Jumlah Laporan Litbang Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan				1 laporan														
Jumlah laporan Litbang Sub Bidang pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana yang dilaksanakan				1 laporan														
Jumlah laporan penelitian mandiri fungsional peneliti bidang ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan				5 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan	7 laporan									
Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang inovasi dan teknologi				70%	80%	90%	95%	100%	70%									
Jumlah laporan litbang sub bidang Inovasi dan pengembangan teknologi yang dilaksanakan				1 laporan														
Jumlah laporan litbang sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi yang dilaksanakan				1 laporan														
Jumlah laporan litbang sub bidang diseminasi kelitbangan yang dilaksanakan				1 laporan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan									





Jumlah laporan penelitian mandiri fungsional peneliti bidang inovasi dan teknologi yang dilaksanakan				4 laporan	1 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan										
Nilai akuntabilitas kinerja PD				78 (BB)	79 (BB)	79 (BB)	80 (A)	81 (A)	56 (CC)										
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran				10 dokumen															
Jumlah laporan evaluasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan				23 laporan															
Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)				80%	85%	90%	95%	100%	80%										
Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran				15 Kegiatan															
Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu				2 Unit	3 Unit	4 Unit	5 Unit	5 Unit	2 Unit										
Jumlah kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana				8 Kegiatan															
Persentase ASN yang memiliki ASN standar kompetensi				80%	81 %	82%	83%	85%	80%										
Jumlah ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi				77 Orang	130 Orang	155 Orang	180 orang	205 Orang	212 Orang										
Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan peningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur				10 Orang	11 Orang	12 Orang	13 Orang	13 Orang	1 orang										



Perubahan Rencana Strategis  
Balitbangda 2019-2023



Persentase teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal				80%	80%	80%	80%	80%	80%									
Persentase terselenggaranya program pemanfaatan teknologi informasi kelitbangan				80%	80%	80%	80%	80%	80%									
Jumlah artikel jurnal riset pembangunan dan bulletin lembusuna				70 artikel														
Persentase terselenggaranya kegiatan Rakorda Kelitbangan				100%	100%	100%	100%	100%	100%									



a. Capaian Target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Program dan kegiatan tahun 2019 telah selesai dilaksanakan, adapun capaian kinerja program dan kegiatan kelitbangannya yakni sebagai berikut :

1) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan indikator kinerja persentase teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal, terealisasi sebesar 80%. Program terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

a) Kegiatan Pengembangan Teknologi Informasi Kelitbangannya.

Kegiatan mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

- Persentase terselenggaranya program pemanfaatan teknologi informasi kelitbangannya terealisasi 80%.
- Jumlah artikel jurnal riset pembangunan dan buletin lembusuan, dengan rincian sebagai berikut : 10 artikel jurnal riset pembangunan, sebanyak 2 kali terbit (Agustus dan Desember 2019) dan 60 artikel buletin lembusuan, sebanyak 12 kali terbit (Januari s.d Desember 2019), terealisasi 70 artikel atau tercapai 100%.

b) Kegiatan Rakorda Kelitbangannya dengan indikator kinerja persentase terselenggaranya kegiatan Rakorda Kelitbangannya terealisasi 100% pada bulan Juli, yang dilaksanakan di kabupaten Kutai Kertanegara, Tenggarong.

2) Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan

Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan dengan indikator kinerja persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang sosial dan pemerintahan tercapai 70%. Pemahaman dimaksud bahwa Bidang Sosial dan Pemerintahan telah menghasilkan rekomendasi sebesar 70%, karena rekomendasi memerlukan proses lebih lanjut untuk menjadi suatu kebijakan. Kendala lainnya yakni tidak adanya penelitian satu pintu yang artinya bahwa Perangkat Daerah lain juga melakukan penelitian, sehingga rekomendasi penelitian bukan hanya dari Balitbangda Prov. Kaltim. Hal ini yang menyebabkan bahwa rekomendasi tergantung pada pemerintah

daerah yang akan memanfaatkan atau belum memanfaatkan rekomendasi tersebut.

Program terbagi dalam dua kegiatan yakni :

- a) Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan, terdiri dari 3 (tiga) sub bidang :
- Sub Bidang Sosial Budaya dengan judul Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) PD Se-Kaltim, laporan akhir telah selesai dilaksanakan.
  - Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan judul kegiatan Penilaian PD Terbaik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018, laporan akhir telah selesai dilaksanakan.
  - Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan dengan judul kegiatan Penghargaan Panji-Panji Keberhasilan Pembangunan Kalimantan Timur, sampai dengan triwulan IV berada pada progress kegiatan : rapat-rapat dan penilaian penghargaan panji-panji keberhasilan pembangunan Kalimantan Timur yang akan dilaksanakan pada bulan Januari bertepatan dengan HUT Prov. Kaltim Tahun 2020.

b) Penelitian Mandiri Bidang Sosial dan Pemerintahan.

Progress penelitian pada triwulan IV telah selesai sebanyak tujuh laporan akhir dengan judul kegiatan :

- a) Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur
- b) Penguatan peran DPRD Kaltim terhadap kinerja pemerintah daerah
- c) Pemetaan Sumber Daya Aparatur Desa Di Kalimantan Timur
- d) Evaluasi RPJMD Provinsi Kaltim Dengan RPJMD Kabupaten/Kota di Kaltim
- e) Kajian Naskah Akademik Perda Pelestarian Bahasa Daerah Di Kaltim
- f) Dana Desa, Urbanisasi, dan Kemandirian Desa
- g) Persepsi Kepala PD Terhadap Penilaian SKPD Terbaik

### 3) Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan indikator kinerja persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang ekonomi dan pembangunan, tercapai 70%. Pemahaman dimaksud bahwa Bidang Ekonomi dan Pembangunan telah menghasilkan rekomendasi sebesar 70%, karena rekomendasi memerlukan proses lebih lanjut untuk menjadi suatu kebijakan. Kendala lainnya yakni tidak adanya penelitian satu pintu yang artinya bahwa Perangkat Daerah lain juga melakukan penelitian, sehingga rekomendasi penelitian bukan hanya dari Balitbangda Prov. Kaltim. Hal ini yang menyebabkan bahwa rekomendasi tergantung pada pemerintah daerah yang akan memanfaatkan atau belum memanfaatkan rekomendasi tersebut

Alokasi dana tersebut terbagi dalam 2 (dua) kegiatan sub bidang yakni :

a) Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari 3 (tiga) sub bidang yakni :

- Sub Bidang Ekonomi dengan judul kegiatan Dampak Penerapan Direct Call Terhadap Komoditas Lokal di Provinsi Kalimantan Timur, laporan akhir telah selesai dilaksanakan.
- Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan judul Sistem Informasi Data Sumber Daya Genetik Kalimantan Timur, sampai dengan triwulan IV laporan akhir telah selesai dilaksanakan. Namun realisasi fisik kegiatan hanya tercapai 48% karena sampai dengan triwulan IV karena tidak cukup waktu untuk menyelesaikan aplikasi Sistem Informasi Data Sumber Daya Genetik Kalimantan Timur.
- Sub Bidang Pengembangan wilayah fisik dan prasarana dengan judul kegiatan Evaluasi Sisa Umur Jalan Poros Samarinda-Bontang, sampai dengan triwulan IV laporan akhir telah selesai dilaksanakan.

b) Penelitian mandiri bidang ekonomi dan pembangunan, sampai dengan triwulan IV, laporan akhir telah selesai dilaksanakan sebanyak 6 laporan dengan judul kegiatan sebagai berikut :

- Analisis Potensi dan Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus di Kota Samarinda dan Kota Balikpapan)
- Studi Pengelolaan Sampah Pasar Organik Untuk Mendukung Pertanian -Organik di Kota Samarinda
- Identifikasi Kualitas Material Lokal Sebagai Bahan Bangunan dan Jalan)
- Analisis Peramalan Jumlah Sampah di Samarinda
- Analisis Peramalan Jumlah Permintaan Darah Di Kutai Kartanegara
- Strategi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Padi di Kabupaten Kutai Kartanegara

#### 4) Program Litbang Bidang Inovasi & Teknologi

Program Litbang Bidang Inovasi & Teknologi dengan indikator kinerja persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang inovasi dan teknologi sampai dengan triwulan IV tercapai 70%. Pemahaman dimaksud bahwa Bidang Inovasi dan Teknologi telah menghasilkan rekomendasi sebesar 70%, karena rekomendasi memerlukan proses lebih lanjut untuk menjadi suatu kebijakan. Kendala lainnya yakni tidak adanya penelitian satu pintu yang artinya bahwa Perangkat Daerah lain juga melakukan penelitian, sehingga rekomendasi penelitian bukan hanya dari Balitbangda Prov. Kaltim. Hal ini yang menyebabkan bahwa rekomendasi tergantung pada pemerintah daerah yang akan memanfaatkan atau belum memanfaatkan rekomendasi tersebut.

Program terdiri dari 2 (dua) kegiatan yakni :

a) Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi, terdiri dari 3 (tiga) sub bidang yakni :

- Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi, sampai dengan triwulan IV penyusunan laporan akhir telah selesai dilaksanakan dengan judul kegiatan Fasilitasi Pembangunan The Buluminung Nuclear Industry Science Technopark dan Gelar Inovasi Teknologi di Kalimantan Timur.

- Sub Bidang Difusi dan Penerapan Teknologi dengan judul kegiatan Konsolidasi, Koordinasi Inovasi dan Teknologi pada Lembaga/Kementerian terkait, sampai dengan triwulan IV penyusunan laporan akhir telah selesai dilaksanakan.
  - Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan dengan judul kegiatan Inventarisasi Hasil Kelitbangan dan Inovasi., sampai dengan triwulan IV penyusunan laporan akhir telah selesai dilaksanakan..
- b) Penelitian mandiri bidang Inovasi dan Teknologi, sampai dengan triwulan IV penyusunan Laporan Akhir telah selesai dilaksanakan dengan judul-judul kegiatan sebagai berikut :
- Pengaruh perlakuan dan jenis plastik terhadap kualitas minyak bakar.
  - Optimalisasi pengolahan bubuk kakao skala rumah tangga dengan simulasi.
  - Pengaruh industri pertambangan batubara terhadap ketahanan pangan di Kalimantan Timur.
  - Pada kegiatan anggaran perubahan penelitian mandiri dengan judul diseminasi hasil-hasil kelitbangan tidak dapat dilaksanakan karena ada beberapa kegiatan penelitian mandiri yang belum selesai sampai dengan triwulan IV.

b. Potensi dan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas yang menjadi wajib menjadi pusat perhatian indikator kunci utama kelitbangan adalah Persentase Kelitbangan yang dilaksanakan dan dimanfaatkan dalam mendukung Kebijakan Pembangunan Daerah dengan target 70% yang belum dimanfaatkan. Perlu adanya suatu indikator kinerja yang tepat sasaran dan lebih terukur misalnya berupa kegiatan kelitbangan yang bersifat aplikatif dan didukung dengan anggaran yang sesuai kebutuhan.



Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2020

Uraian ***	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	1	2	1	2	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Belanja	4.745.425.350,00	5.190.316.872,50	4,373,907,399	4.990.242.453,00	0,92	0,96	8,57	12,35
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.349.575.000,00	1.342.485.672,50	1,175,509,360	1.268.803.028,00	0,87	0,95	(0,53)	7,35
Kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran	1.349.575.000,00	1.342.485.672,50	1,175,509,360	1.268.803.028,00	0,87	0,95	(0,53)	7,35
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	511.450.000,00	847.281.000,00	401,650,000	799.236.203,00	0,79	0,94	39,64	49,75
Kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana	511.450.000,00	847.281.000,00	401,650,000	799.236.203,00	0,79	0,94	39,64	49,75
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	1.073.935.000,00	1.427.178.000,00	553,988,000	1.417.914.943,00	0,52	0,99	24,75	60,93



Uraian ***	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	1	2	1	2	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pemerintah Daerah								
Kegiatan koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	986.485.000,00	1.282.678.000,00	553,988,000	1.273.594.943,00	0,56	0,99	23,09	56,50
Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	87.450.000,00	144.500.000,00	0	144.320.000,00	0,00	1,00	39,48	100,00
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	174.620.000,00	25.500.000,00	25,500,000	24.817.400,00	0,15	0,97	(584,78)	(2,75)
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	103.120.000,00	21.000.000,00	21,000,000	20.517.400,00	0,20	0,98	(391,05)	(2,35)
Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	71.500.000,00	4.500.000,00	4,500,000	4.300.000,00	0,06	0,96	(1.488,89)	(4,65)





Uraian ***	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	1	2	1	2	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	129.420.000,00	210.460.000,00	59,550,000	206.157.500,00	0,46	0,98	38,51	71,11
Kegiatan Pengembangan Teknologi Informasi Kelitbang	42.550.000,00	85.075.000,00	59,550,000	84.575.000,00	1,40	0,99	49,99	29,59
Kegiatan Rakorda Kelitbang	86.870.000,00	125.385.000,00	0	121.582.500,00	0,00	0,97	30,72	100,00
Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	435.447.350,00	421.545.000,00	220,245,000	409.553.979,00	0,51	0,97	(3,30)	46,22
Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	295.947.350,00	343.240.000,00	141,940,000	340.205.579,00	0,48	0,99	13,78	58,28
Penelitian Mandiri Bidang Sosial dan Pemerintahan	139.500.000,00	78.305.000,00	78,305,000	69.348.400,00	0,56	0,89	(78,15)	(12,92)
Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	477.058.000,00	482.102.500,00	182,552,500	446.535.500,00	0,38	0,93	1,05	59,12
Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	331.515.000,00	445.405.500,00	142,860,500	410.001.600,00	0,43	0,92	25,57	65,16





Uraian ***	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	1	2	1	2	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penelitian mandiri bidang ekonomi dan pembangunan	145.543.000,00	36.697.000,00	39,692,000	36.533.900,00	0,27	1,00	(296,61)	(8,64)
Program Litbang Bidang Inovasi & Teknologi	593.920.000,00	433.764.700,00	185,364,700	417.223.900,00	0,31	0,96	(36,92)	55,57
Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	483.920.000,00	387.764.700,00	139,364,700	375.911.500,00	0,29	0,97	(24,80)	62,93
Penelitian mandiri bidang inovasi dan teknologi	110.000.000,00	46.000.000,00	46,000,000	41.312.400,00	0,42	0,90	(139,13)	(11,35)



### 2.3.1 Kondisi Umum Wilayah Kerja Balitbangda

#### a. Gambaran Umum

Kalimantan Timur adalah provinsi yang berada di Pulau Kalimantan. Dengan luas wilayah sebesar 127.346,92 km<sup>2</sup>, Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas keempat di Indonesia setelah Papua, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Secara astronomis, Kalimantan Timur terletak antara 113°35'31" dan 119°12'48" bujur timur, dan antara 2°34'23" lintang utara dan 2°44'14" lintang selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kalimantan Timur memiliki batas-batas sebagai berikut: Utara – Kalimantan Utara; Selatan – Kalimantan Selatan; Barat – Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta Negara Malaysia; Timur – Laut Sulawesi dan Selat Makassar.

Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Indonesia bagian Timur. Daerah yang juga dikenal sebagai gudang kayu dan hasil pertambangan ini mempunyai ratusan sungai yang tersebar pada hampir semua kabupaten/kota. Sungai juga menjadi salah satu sarana angkutan utama di samping angkutan darat. Adapun sungai terpanjang di Kalimantan Timur adalah Sungai Mahakam. Sungai ini berawal dari Mahakam Ulu, melintasi wilayah Kutai Barat dan berhilir di Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda.

Secara administratif terdiri dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang meliputi 7 (tujuh) Kabupaten, yaitu Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara dan Mahakam Ulu; dan 3 (tiga) Kota, yaitu: Balikpapan, Samarinda dan Bontang.

#### b. Kependudukan

Jumlah penduduk Kalimantan Timur berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 sebesar 3.721.389 orang dengan laju pertumbuhan penduduk 1,79 persen dibandingkan tahun 2010. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.950.883 orang dan penduduk perempuan sebanyak 1.770.506 orang.

Pada tahun 2019, Angkatan kerja di Kalimantan Timur sebanyak 1.815.382 orang yang terdiri dari 1.704.808 orang yang berstatus bekerja dan 110.574 orang berstatus pengangguran terbuka. Dari jumlah ini, diperoleh TPAK Kalimantan Timur pada tahun 2019 sebesar 66,44 persen, nilai ini mengalami kenaikan sebesar 1,45 persen dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 (64,99 persen). Dari jumlah Angkatan kerja tersebut, lulusan SD sebanyak 482.122 orang, lulusan SMP sebanyak 292.942 orang, lulusan SMA sebanyak 736.116 orang dan lulusan perguruan tinggi sebanyak 304.202 orang.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019 sebesar 76,61 diatas rata-rata IPM Indonesia yang sebesar 71,92. Provinsi Kalimantan Timur menempati urutan ketiga setelah Provinsi DKI Jakarta dan DI. Yogyakarta.

#### c. Hubungan antar Lembaga

Guna meningkatkan pencapaian sasaran, Balitbangda Prov. Kaltim juga terlibat dalam kerjasama yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan beberapa Lembaga Litbang Kementerian/Perguruan Tinggi/Pusat Penelitian dan lain- lain yaitu:

1. MoU dengan Badan Standardisasi Nasional tentang Pembinaan dan pengembangan Standardisasi di Kalimantan Timur.
2. MoU dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tentang Pengkajian, penerapan dan pemasyarakatan Teknologi untuk mendukung pembangunan daerah Prov. Kaltim.
3. MoU dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian tentang Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur.
4. MoU dengan Lembaga Ketahanan Nasional tentang Kerjasama dalam rangka peningkatan dan Pengembangan Ketahanan Nasional di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
5. MoU antara Balitbangda Prov. Kaltim dengan Dinas Perkebunan Prov. Kaltim, Universitas Mulawarman dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit,

- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Kaltim tentang Kerjasama Pembangunan Pusat Teknologi dan Informasi Kelapa Sawit.
6. MoU dengan Institut Pertanian Bogor tentang Pengembangan Ekonomi dan Wilayah berbasis Sumber Daya Lokal .
  7. MoU dengan Lembaga Administrasi Negara tentang Penyelenggaraan Pendidikan Akademi dan Profesional, Pendidikan dan Pelatihan, Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.
  8. MoU dengan Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian, Universitas Mulawarman tentang Kerjasama Pengembangan dan Penerapan hasil Litbang Teknologi Industri untuk mendukung Pembangunan Industri di Kalimantan Timur.
  9. MoU dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  10. MoU dengan Badan Tenaga Atom Nasional.

Sedangkan fokus kelitbangan kedepan terkait dengan IPTEK sebagaimana tertuang dalam program Kementerian Riset dan Teknologi yaitu :

- Kelitbangan Teknologi Pangan
- Kelitbangan Teknologi Energi Alternatif dan Terbarukan
- Kelitbangan Manajemen Transportasi
- Kelitbangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Kelitbangan Kesehatan dan obat-obatan
- Kelitbangan Pertahanan Keamanan

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan adalah suatu hal atau bentuk usaha yang memiliki tujuan untuk menunggangh kemampuan. Tantangan yang dihadapi tersebut kemudian dianalisis berdasarkan aspek organisasi dan tata laksana, aspek sumber daya manusia, aspek sarana dan prasarana, aspek pembiayaan dan aspek kerjasama, sehingga diperoleh tantangan pengembangan pelayanan Balitbangda Prov. Kaltim sebagai berikut :

- **Aspek Organisasi dan Tata Laksana**, adanya perubahan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi perubahan organisasi yang ada di daerah, sehingga perlu penataan ulang maupun penyempurnaan struktur organisasi di daerah. Tipologi organisasi Balitbangda Prov. Kaltim yang miskin struktur namun kaya fungsi dan tergolong dalam tipe “B”, saat ini perlu dilakukan peningkatan mengingat peran dan tugas Balitbangda yang semakin kompleks.  
Selain itu, belum terkoordinasi, tersinkronisasi, dan terintegrasinya program kelitbang dengan perangkat daerah lainnya menjadi suatu kondisi yang mengakibatkan belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan itu sendiri.
- **Aspek Sumber Daya Manusia**, dalam rangka peningkatan kinerja pegawai, diperlukan pendidikan dan pelatihan tambahan sesuai dengan kebutuhan organisasi terutama bagi fungsional peneliti sebagai ujung tombak organisasi litbang. Namun kesempatan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan sangat terbatas, sehingga perlu diatasi, yaitu antara lain dengan memberikan kesempatan untuk memperoleh fasilitas pendidikan, baik pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, pendidikan teknis maupun pelatihan yang bersifat fungsional jangka menengah dan pendek. Meningkatkan wawasan melalui seminar, diseminasi, workshop, lokakarya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, para ASN baik tingkat eselon maupun staf perlu diberikan pengetahuan dan kompetensi mengenai kelitbangan semisal dalam hal pembuatan KAK/TOR, penyusunan proposal, dan sebagainya.
- **Aspek Sarana dan Prasarana**, salah satu unsur penting yang perlu mendapat perhatian adalah fasilitas ruang perkantoran berikut fasilitas pendukungnya. Terutama laboratorium data/pusat data litbang yang belum ada, fasilitas perpustakaan yang masih perlu untuk ditingkatkan, serta fasilitas teknologi informasi yang perlu dikembangkan. Hal ini harus menjadi perhatian guna menjamin kualitas hasil kelitbangan.

- **Aspek Pembiayaan**, dalam pelaksanaan program dan kegiatan kelitbang aspek anggaran menjadi kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Alokasi anggaran yang dikelola masih terbatas dan bersumber pada APBD. Sedangkan dana-dana lainnya dari sumber yang sah dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Sementara pembangunan dan pengembangan IPTEK di daerah memerlukan biaya yang tidak sedikit.
- **Aspek Kerjasama**, aspek kerjasama litbang akan dikembangkan bersama dengan pemerintah, Pemerintah Kabupaten Kota se Kalimantan Timur, Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur dan Pihak Swasta, dan untuk beberapa kementerian teknis terkait di pusat belum dilakukan secara optimal. Hal ini perlu dilakukan karena litbang di Perguruan Tinggi dan Kementrian/Lembaga di pusat memiliki SDM Peneliti yang berpengalaman sesuai dengan keahliannya. Kemudian kerjasama dengan donor internasional masih belum dilakukan. Litbang masih terfokus pada kegiatan penelitian, pengembangan serta kajian yang dibiayai dari sumber dana APBD.

Peluang adalah suatu cara untuk mengungkap pengetahuan atau kepercayaan. Selain itu peluang merupakan ruang gerak, baik yang konkret maupun yang abstrak bagi suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Ditinjau dari urusan penunjang pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan, Balitbangda Prov. Kaltim mempunyai peluang pengembangan pelayanan sebagai berikut :

- Kedudukan Balitbangda Sangat Strategis, maksudnya memantapkan penyelenggaraan kelitbang model satu pintu, yang artinya kegiatan kelitbang hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Litbang Provinsi dan Badan Litbang Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kelitbang. Oleh karena itu, diperlukan regulasi terkait hal tersebut.
- Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maksudnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan syarat penting diterapkan dalam proses pembangunan dalam bentuk penguatan inovasi daerah.



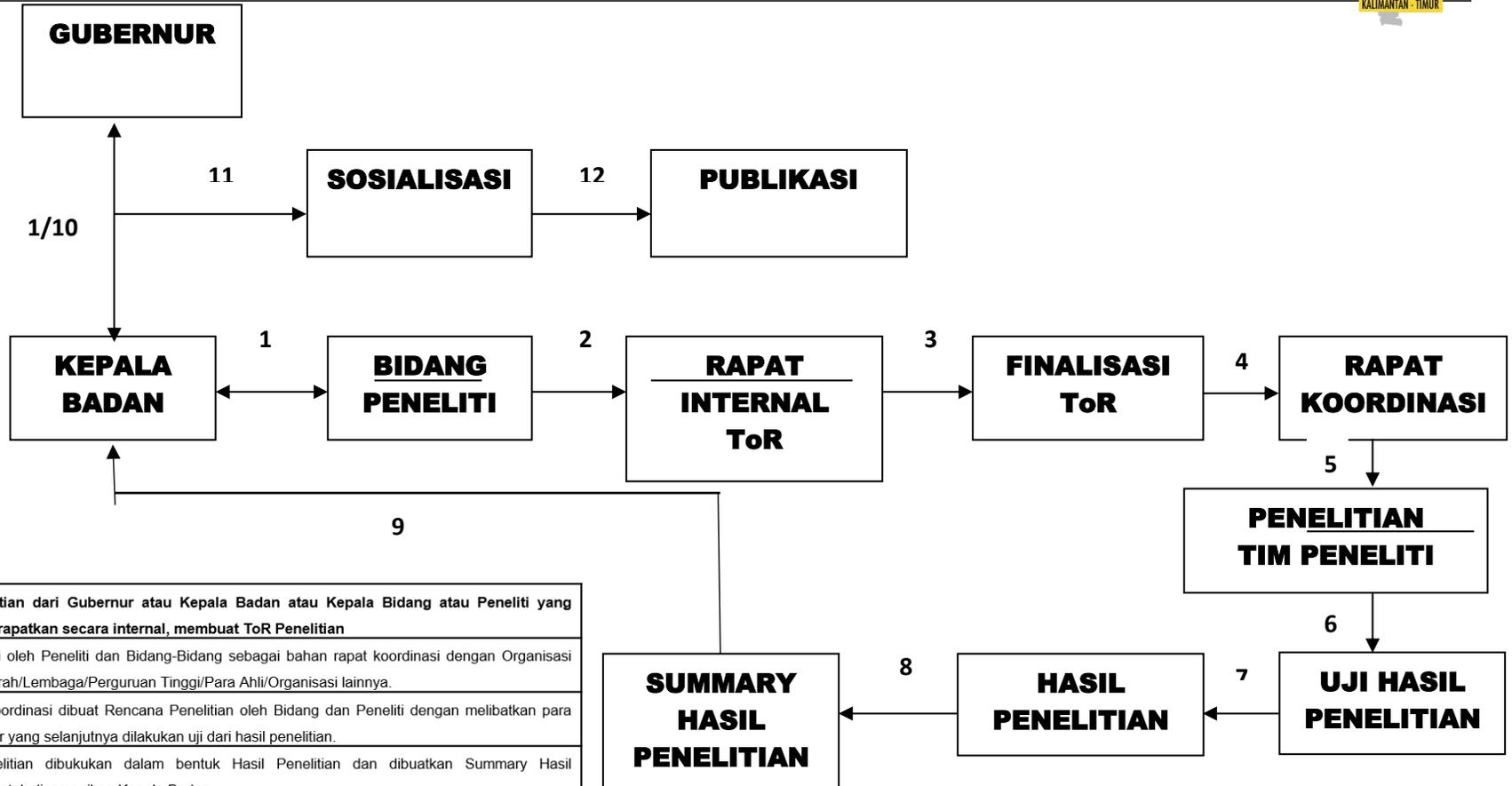
- Hubungan jejaring antar institusi perguruan tinggi, bisnis, pemerintah, dan masyarakat (ABGC/ Akademisi, Bisnis, *Government*, dan *Community*), maksudnya melalui jejaring tersebut akan mempercepat dan memperluas diseminasi hasil kelitbangan dan IPTEK.
- Instansi kelitbangan mendapatkan penugasan dari Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD).





## 2.5 Alur Proses Layanan

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BALITBANGDA PROVINSI KALTIM

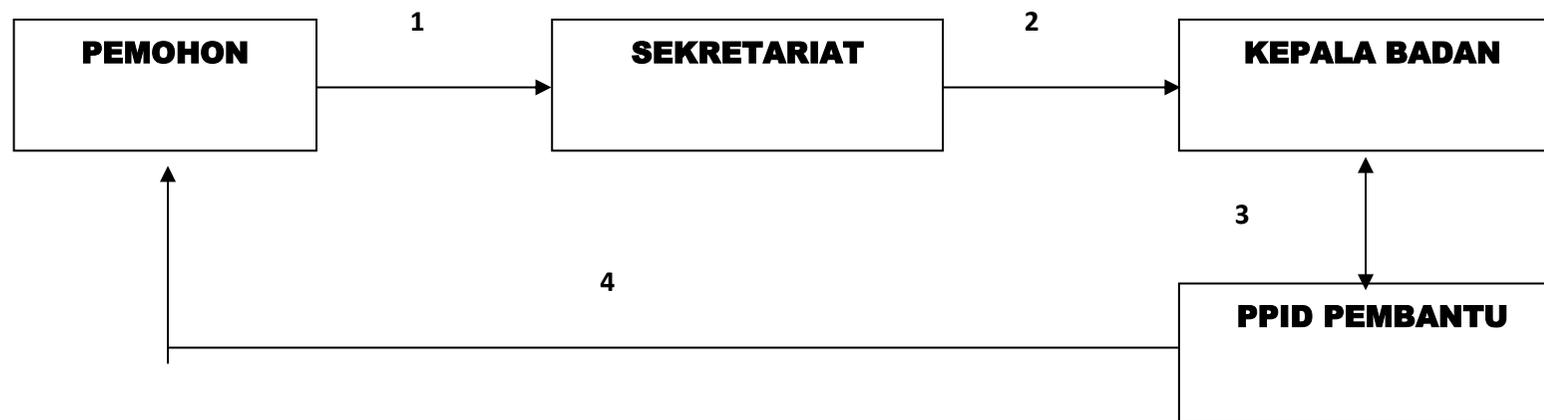


1/2	:	Usulan penelitian dari Gubernur atau Kepala Badan atau Kepala Bidang atau Peneliti yang selanjutnya dirapatkan secara internal, membuat ToR Penelitian
3/4	:	ToR difinalisasi oleh Peneliti dan Bidang-Bidang sebagai bahan rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga/Perguruan Tinggi/Para Ahli/Organisasi lainnya.
5/6	:	Hasil Rapat Koordinasi dibuat Rencana Penelitian oleh Bidang dan Peneliti dengan melibatkan para pihak dan pakar yang selanjutnya dilakukan uji dari hasil penelitian.
7/8/9	:	Uji hasil penelitian dibukukan dalam bentuk Hasil Penelitian dan dibuatkan Summary Hasil Penelitiannya untuk disampaikan Kepala Badan.
10	:	Kepala Badan menyampaikan hasil penelitian kepada Gubernur.
11/12	:	Hasil Penelitian disosialisasikan kepada stake holder yang berkepentingan yang selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat.





## STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN DATA DAN INFORMASI BALITBANGDA PROVINSI KALTIM



### **KETERANGAN**

1	:	Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Balitbangda sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui Sekretariat.
2/3	:	Sekretaris meneruskan surat permohonan kepada Kepala Badan dan selanjutnya di disposisi ke Tim PPID Pembantu untuk ditindaklanjuti dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
4	:	Permohonan informasi/data disampaikan kepada Pemohon.



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BALITBANGDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur ada 5 (lima) permasalahan utama yaitu: 1) rendahnya daya saing SDM Kaltim, 2) pertumbuhan ekonomi yang masih rendah dan fluktuatif, 3) belum terpenuhinya pelayanan infrastruktur secara merata, 4) belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dan 5) belum terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sehingga ditinjau dari permasalahan tersebut maka permasalahan yang terkait dengan pelayanan litbang dan faktor-faktor yang mempengaruhi yang dapat diidentifikasi berdasarkan analisis gambaran pelayanan kelitbang secara internal dan eksternal dapat dijabarkan sebagaimana Tabel 3.1 dan 3.2 berikut :

Tabel 3.1  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Balitbangda Prov. Kaltim

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Pelayanan SKPD.	1. Pelaksanaan Litbang Bidang Kesra dan Kemasyarakatan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi.	1. Standar kebutuhan pelayanan yang dikembangkan secara mandiri sesuai tugas dan fungsi SKPD. 2. Standar Pelayanan Publik (SPP)	1. Kualitas dan kuantitas SDM Peneliti masih rendah. 2. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). 3. Kedudukan Balitbangda sangat strategis. 4. Komitmen pimpinan sangat kuat.	1. Tersedianya SDM Peneliti di luar Balitbangda. 2. Perkembangan Riset, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 3. Tersedianya dana dan lembaga litbang partnership. 4. Peraturan perundangan yang sering berubah-ubah. 5. Persaingan di era globalisasi.	1. Belum ada kebijakan satu pintu mengenai kegiatan litbang, masih tersebar di SKPD. 2. Belum dikembangkan data base hasil penelitian dan pengembangan di lembaga litbang. 3. Hasil - hasil litbang belum mendapat perhatian dan dukungan dari para pihak. 4. Terbatasnya jumlah peneliti yang menunjang dengan kebutuhan program strategis pemerintahan daerah.

Aspek Kajian (1)	Capaian/Kondisi saat ini (2)	Standar yang digunakan (3)	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD (6)
			Internal (kewenangan SKPD) (4)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD) (5)	
				6. Persepsi stakeholder yang kurang responsif terhadap litbang.	5. Terbatasnya prasarana dan sarana penunjang penelitian (laboratorium, teknologi informasi, perpustakaan, dan lain-lain). 6. Belum optimalnya koordinasi dengan kab/kota terkait dengan fungsi litbang yang disebabkan belum terbentuknya lembaga litbang di kab/kota kecuali kab. Kukar. 7. Belum tersusunnya grand design dan road map penelitian dan pengembangan di daerah.

Tabel 3.2  
Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal) OPD Balitbangda Prov. Kaltim

No	Isu Strategis				
	Dinamika Internasional (1)	Dinamika Nasional (2)	Dinamika Regional/Lokal (3)	Dinamika Regional/Lokal (4)	Lain-lain (5)
1	Kerjasama litbang dengan donatur internasional	1. Sistem Inovasi Nasional (SINAS).	1. Kinerja Inovasi Daerah (KID)	1. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)/Hak Paten untuk temuan RISTEK di masyarakat perlu dijamin	



Salah satu instrumen utama dalam kegiatan pengamatan dan identifikasi faktor-faktor lingkungan strategis adalah teknik analisis SWOT (*strength, weaknesses, opportunity, and threats*), atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Pada pokoknya, teknik analisis SWOT membedah kondisi organisasi berdasarkan **faktor internal** (kekuatan dan kelemahan), serta **faktor eksternal** (peluang dan ancaman) sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman**  
**Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur**

No	Kekuatan (Strength)	No	Kelemahan (Weaknesses)
S1	Kedudukan Balitbangda Sangat Strategis	W1	Kuantitas SDM Peneliti belum optimal
S2	Komitmen Pimpinan Kuat	W2	Belum Optimalnya Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kegiatan Litbang
S3	Komitmen Kepala Daerah Sangat Kuat	W3	Lemahnya jejaring kerja
S4	Kualitas SDM Peneliti	W4	Belum adanya perda penelitian satu pintu
		W5	Belum dikembangkan data base hasil penelitian terintegrasi dan pengembangan di lembaga litbang.
		W6	Terbatasnya prasarana dan sarana penunjang penelitian (lahan, laboratorium, database litbang).
		W7	Belum optimalnya koordinasi dengan kab/kota terkait dengan fungsi litbang yang disebabkan belum terbentuknya lembaga litbang di beberapa kab/kota di Kaltim
		W8	Belum adanya rencana induk kelitbangan.
		W9	Belum adanya database peneliti.
		W10	Belum dijadikannya rekomendasi hasil kelitbangan sebagai dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah
		W11	Tidak adanya respon dari OPD teknis terkait dalam pengajuan penelitian
		W12	Belum dilaksanakannya SIDA secara optimal.



		W13	Belum memadainya pendanaan untuk kelitbangan
<b>No</b>	<b>Peluang (Opportunity)</b>	<b>No</b>	<b>Ancaman (Threats)</b>
O1	Tersedianya SDM Peneliti di Luar Balitbangda	T1	Peraturan Perundangan Yang Sering Berubah-ubah
O2	Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	T2	Persaingan di Era Globalisasi
O3	Tersedianya dana dari lembaga litbang partnership	T3	Persepsi stakeholders yang kurang responsif
O4	Adanya peraturan tentang SIDA	T4	Adanya rekomendasi penelitian yang dilakukan opd lain
O5	Adanya pemindahan IKN ke Kaltim	T5	Dampak bertambahnya jumlah penduduk, sosial ekonomi, lingkungan, air bersih, listrik dan ASN dari luar daerah
O6	Adanya asosiasi peneliti di kaltim (Himperindo Kaltim)		

Adapun hasil penilaian terhadap tingkat urgensi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) pada Balitbangda Provinsi Kaltim dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.4**  
**Penilaian Tingkat Urgensi Faktor Internal**  
**(Strength dan Weaknesses)**

<b>KEKUATAN (STRENGTH)</b>	<b>NILAI URGENSI (NU)</b>	<b>BOBOT FAKTOR (BF)</b>
Kedudukan Balitbangda Sangat Strategis	5	$5 / 60 \times 100\% = 8 \%$
Komitmen Pimpinan Kuat	4	$4 / 60 \times 100\% = 7 \%$
Komitmen Kepala Daerah Sangat Kuat	5	$5 / 60 \times 100\% = 8 \%$
Kualitas SDM Peneliti	4	$4 / 60 \times 100\% = 7 \%$
<b>KELEMAHAN (WEAKNESSES)</b>	<b>NILAI URGENSI (NU)</b>	<b>BOBOT FAKTOR (BF)</b>
Kuantitas SDM Peneliti belum optimal	3	$3 / 60 \times 100\% = 5 \%$
Belum Optimalnya Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kegiatan Litbang	4	$4 / 60 \times 100\% = 7 \%$
Lemahnya jejaring kerja	3	$3 / 60 \times 100\% = 5 \%$
Belum adanya regulasi penelitian satu pintu	4	$4 / 60 \times 100\% = 7 \%$



Belum dikembangkan data base hasil penelitian terintegrasi dan pengembangan di lembaga litbang.	3	$3 / 60 \times 100\% = 5 \%$
Terbatasnya prasarana dan sarana penunjang penelitian (lahan, laboratorium, database litbang).	4	$4 / 60 \times 100\% = 7 \%$
Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dengan kab/kota terkait dengan fungsi litbang yang disebabkan belum terbentuknya lembaga litbang di beberapa kab/kota di Kaltim	3	$3 / 60 \times 100\% = 5 \%$
Belum adanya rencana induk kelitbang.	4	$4 / 60 \times 100\% = 7 \%$
Belum adanya database peneliti.	3	$3 / 60 \times 100\% = 5 \%$
Belum dijadikannya rekomendasi hasil kelitbang sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.	4	$4 / 60 \times 100\% = 7 \%$
Tidak adanya respon dari PD teknis terkait dalam pengajuan penelitian	3	$3 / 60 \times 100\% = 5 \%$
Belum dilaksanakannya SIDA secara optimal.	4	$4 / 60 \times 100\% = 7 \%$
<b>Jumlah</b>	<b>60</b>	<b>100 %</b>

Sedangkan hasil penilaian terhadap tingkat urgensi faktor eksternal (peluang dan ancaman) dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.5**  
**Penilaian Tingkat Urgensi Faktor Eksternal**  
**(Opportunity dan Threats)**

PELUANG (OPPORTUNITY)	NILAI URGENSI (NU)	BOBOT FAKTOR (BF)
Tersedianya SDM Peneliti di Luar Balitbangda	4	$4 / 32 \times 100\% = 12,5 \%$
Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	5	$5 / 32 \times 100\% = 16 \%$
Tersedianya dana dari lembaga litbang partnership	3	$3 / 32 \times 100\% = 9 \%$
Adanya peraturan tentang SIDA	4	$4 / 32 \times 100\% = 12,5 \%$
Adanya pemindahan IKN ke Kaltim	5	$5 / 32 \times 100\% = 16 \%$
Adanya asosiasi peneliti di kaltim	4	$4 / 32 \times 100\% = 12,5 \%$
ANCAMAN (THREATS)	NILAI URGENSI (NU)	BOBOT FAKTOR (BF)



Peraturan Perundangan Yang Sering Berubah-ubah	4	$4 / 32 \times 100\% = 12,5 \%$
Persaingan di Era Globalisasi	3	$3 / 32 \times 100\% = 9 \%$
Persepsi stakeholders yang kurang responsif	3	$3 / 32 \times 100\% = 9 \%$
Adanya rekomendasi penelitian yang dilakukan opd lain	4	$4 / 32 \times 100\% = 12,5 \%$
Dampak bertambahnya jumlah penduduk, sosial ekonomi, lingkungan, air bersih, listrik dan ASN dari luar daerah	3	$3 / 32 \times 100\% = 9 \%$
<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>100 %</b>

Tabel di atas menggambarkan bahwa faktor ancaman lebih kecil dibanding bobot pada faktor peluang. Ini berarti Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dapat mengembangkan peluang yang ada untuk mengantisipasi sekaligus mengatasi ancaman. Setelah ditentukan Nilai Urgensi dan ditemukan Bobot Faktor, tahap selanjutnya adalah menentukan Nilai Dukungan (ND) dan Nilai Bobot Dukungan (NBD). Dalam konteks Balitbangda Kalimantan Timur, Nilai Dukungan dan Nilai Bobot Dukungannya dapat dideskripsikan sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Nilai Dukungan & Nilai Bobot Dukungan Faktor Lingkungan Internal & Eksternal Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur**

<b>Kekuatan (Strength)</b>	<b>Nilai Dukungan (ND)</b>	<b>Nilai Bobot Dukungan (NBD)</b>
Kedudukan Balitbangda Sangat Strategis	5	0,40
Komitmen Pimpinan Kuat	4	0,28
Komitmen Kepala Daerah Sangat Kuat	5	0,40
Kualitas SDM Peneliti	4	0,28
		<b>1,36</b>
<b>Kelemahan (Weaknesses)</b>	<b>Nilai Dukungan (ND)</b>	<b>Nilai Bobot Dukungan (NBD)</b>
Kuantitas SDM Peneliti belum optimal	3	0,15
Belum Optimalnya Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kegiatan Litbang	4	0,28
Lemahnya jejaring kerja	3	0,15
Belum adanya regulasi penelitian satu pintu	4	0,28
Belum dikembangkan data base hasil penelitian terintegrasi dan pengembangan di lembaga litbang.	3	0,15



Terbatasnya prasarana dan sarana penunjang penelitian (lahan, laboratorium, database litbang).	4	0,28
Belum optimalnya koordinasi dengan kab/kota terkait dengan fungsi litbang yang disebabkan belum terbentuknya lembaga litbang di beberapa kab/kota di Kaltim	3	0,15
Belum adanya rencana induk kelitbangan.	4	0,28
Belum adanya database peneliti.	3	0,15
Belum dijadikannya rekomendasi hasil kelitbangan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.	4	0,28
Tidak adanya respon dari PD teknis terkait dalam pengajuan penelitian	3	0,15
Belum dilaksanakannya SIDA secara optimal.	4	0,28
		<b>2,58</b>
<b>Peluang (Opportunity)</b>	<b>Nilai Dukungan (ND)</b>	<b>Nilai Bobot Dukungan (NBD)</b>
Tersedianya SDM Peneliti di Luar Balitbangda	4	0,5
Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	5	0,8
Tersedianya dana dari lembaga litbang partnership	3	0,27
Adanya peraturan tentang SIDA	4	0,5
Adanya pemindahan IKN ke Kaltim	5	0,8
Adanya asosiasi peneliti di kaltim	4	0,5
		<b>3,37</b>
<b>Ancaman (Threats)</b>	<b>Nilai Dukungan (ND)</b>	<b>Nilai Bobot Dukungan (NBD)</b>
Peraturan Perundangan Yang Sering Berubah-ubah	4	0,5
Persaingan di Era Globalisasi	3	0,27
Persepsi stakeholders yang kurang responsif	3	0,27
Adanya rekomendasi peneltian yang dilakukan PD lain	4	0,5



Dampak bertambahnya jumlah penduduk, sosial ekonomi, lingkungan, air bersih, listrik dan ASN dari luar daerah	3	0,27
		<b>1,81</b>

Dalam hal mengevaluasi dan menganalisis lingkungan strategis, Balitbangda mempergunakan analisis SWOT sebagai salah satu analisis pilihan yang sudah sangat populer, yang pada dasarnya dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok strategik, yaitu:

1. **Strategi Strength – Opportunities (SO)**, yaitu strategi untuk memaksimalkan kekuatan dengan memanfaatkan peluang yang ada.
2. **Strategi Strength – Threats (ST)**, yaitu strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman serta mengubahnya menjadi peluang.
3. **Strategi Weakness–Opportunity (WO)**, yaitu strategi memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada.
4. **Strategi Weakness – Threats (WT)**, yaitu strategi memperkecil kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

Dari analisis tersebut di atas maka faktor kunci keberhasilan dapat diuraikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.7**  
**Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) SKPD. Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur**

Urutan FKK	Faktor Internal		
	Kekuatan (Strength)	No	Kelemahan (Weaknesses)
S3	Komitmen Kepala Daerah Sangat Kuat	W2	Belum Optimalnya Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kegiatan Litbang
S1	Kedudukan Balitbangda Sangat Strategis	W4	Belum adanya perda penelitian satu pintu
S2	Komitmen Pimpinan Kuat	W6	Terbatasnya prasarana dan sarana penunjang penelitian (lahan, laboratorium, database litbang).
S4	Kualitas SDM Peneliti	W8	Belum adanya rencana induk kelitbang.



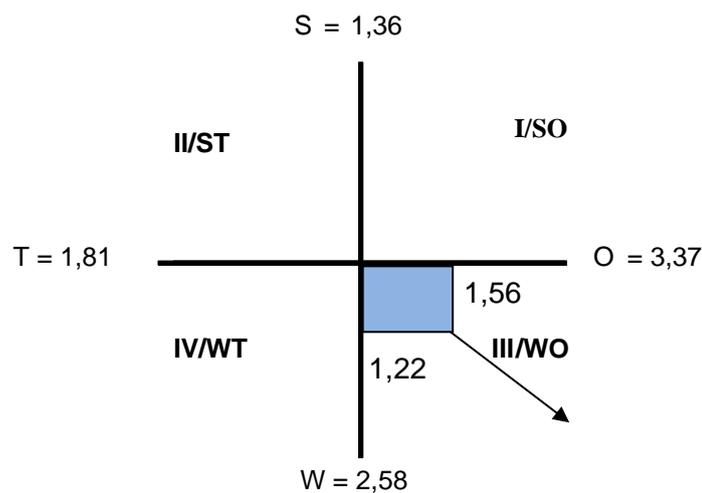
		W10	Belum dijadikannya rekomendasi hasil kelitbang sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
		W12	Belum dilaksanakannya SIDA secara optimal.
		W1	Kuantitas SDM Peneliti belum optimal
		W3	Lemahnya jejaring kerja
		W5	Belum dikembangkan data base hasil penelitian terintegrasi dan pengembangan di lembaga litbang.
		W7	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dengan kab/kota terkait dengan fungsi litbang yang disebabkan belum terbentuknya lembaga litbang di beberapa kab/kota di Kaltim
		W9	Belum adanya database peneliti.
		W11	Tidak adanya respon dari opd teknis terkait dalam pengajuan penelitian
Urutan FKK	<b>Faktor Eksternal</b>		
	<b>Peluang (Opportunity)</b>	<b>No</b>	<b>Ancaman (Threats)</b>
O5	Adanya pemindahan IKN ke Kaltim	T1	Peraturan Perundangan Yang Sering Berubah-ubah
O2	Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	T4	Adanya rekomendasi peneltian yang dilakukan opd lain
O1	Tersedianya SDM Peneliti di Luar Balitbangda	T2	Persaingan di Era Globalisasi
O4	Adanya peraturan tentang SIDA	T3	Persepsi stakeholders yang kurang responsif
O6	Adanya asosiasi peneliti di kaltim	T5	Dampak bertambahnya jumlah penduduk, sosial ekonomi, lingkungan, air bersih, listrik dan ASN dari luar daerah
O3	Tersedianya dana dari lembaga litbang partnership		

Sesuai dengan kriteria tersebut di atas, maka berdasarkan hasil evaluasi yang dipilih dari analisis SWOT untuk penentuan peta kekuatan organisasi adalah:



- S : Komitmen Kepala Daerah Sangat Kuat, dan Kedudukan Balitbangda Sangat Strategis
- W : Ada 6 weaknes dengan bobot yang sama, diantaranya belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan litbang, kurangnya sarana penelitian dan belum dilaksanakannya SIDA secara optimal.
- O : Adanya pemindahan IKN ke Kaltim, dan Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- T : Peraturan perundangan yang sering berubah-ubah dan adanya rekomendasi penelitian dari OPD lain.

Dapat dipetakan posisi kekuatan organisasi seperti gambar berikut :



**Gambar 3.1.** Peta Posisi Kekuatan Organisasi Balitbangda Prov. Kaltim

Diagram peta posisi kekuatan berdasarkan analisis SWOT di atas menunjukkan bahwa Balitbangda Prov. Kaltim berada pada kuadran III WO yaitu strategi mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada.

### 3.2 Telaahan Renstra K/L dan RPJMD Provinsi

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri tentang tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD, maka faktor penghambat ataupun faktor pendorong dari pelayanan litbang yang mempengaruhi permasalahan litbang adalah:



1. Belum ada kebijakan satu pintu mengenai kegiatan litbang, masih tersebar di OPD.
2. Belum dikembangkan data base hasil penelitian dan pengembangan di lembaga litbang.
3. Hasil - hasil litbang belum mendapat perhatian dan dukungan dari para pihak.
4. Terbatasnya jumlah peneliti dan bidang kepakarannya yang menunjang dengan kebutuhan program strategis pemerintahan provinsi.
5. Terbatasnya prasarana dan sarana penunjang penelitian (laboratorium, database litbang, perpustakaan, dan lain-lain).
6. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dengan kab/kota terkait dengan fungsi litbang yang disebabkan belum terbentuknya lembaga litbang di beberapa kab/kota di Kaltim.
7. Belum tersusunnya *Grand Design* dan road map penelitian dan pengembangan di daerah.

Yang menjadi pendorong guna menyelesaikan permasalahan tersebut adalah keberadaan Litbang dan IPTEK yang sangat strategis dan diperlukan dalam percepatan Otonomi Daerah terutama dalam mendorong pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di daerah. Hal ini didukung dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 pada pasal 20 (1) dan Pasal 21 (4) : Fungsi Pemda sebagai motivator, stimulator dan fasilitator dalam pembangunan IPTEK maka perlu dibentuk Balitbangda untuk melaksanakan tupoksi tersebut.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dijadikan sebagai momentum pengembangan litbang secara Nasional. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2011, kegiatan kelitbangan meliputi 2 kegiatan yaitu Kegiatan Utama yang terdiri 1). Penelitian, 2). Pengembangan, 3). Pengkajian, 4). Penerapan, 5). Perekayasaan, 6). Pengoperasian, dan kegiatan pendukung meliputi: 1). Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, 2). Ketatalaksanaan, 3). Sumber Daya Manusia, 4). Sumberdaya organisasi lainnya.



### 3.3 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu objek yang dapat digunakan dalam penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek yang hasilnya dapat digunakan sebagai masukan untuk pengembangan ruang dan wilayah tersebut. Arahan dari penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek menjadi penting sebagai acuan dalam menetapkan peruntukkan ruang dan wilayah, sehingga peruntukkan ruang dan wilayah tersebut tidak semata-mata ditetapkan secara subjektif, namun ditetapkan secara objektif berdasarkan potensi dan kehandalan sumber daya yang dimiliki di masing-masing ruang atau wilayah.

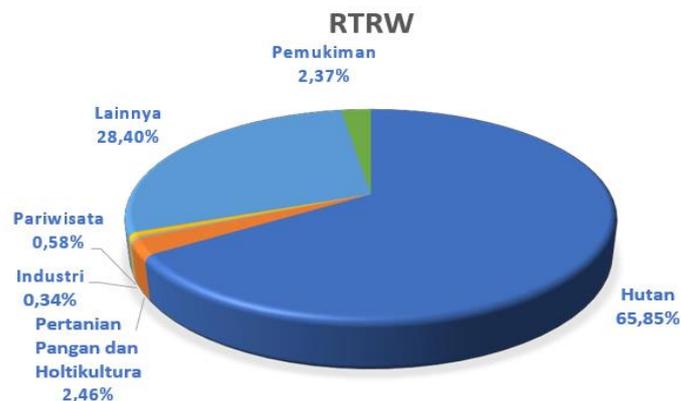
Secara geografis, Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 20 33' Lintang Utara (LU) dan 2° 25' Lintang Selatan (LS), 113° 44' Bujur Timur (BT) dan 119° 00' Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan cakupan wilayah yang cukup luas, yaitu mencapai 16.732.065 ha. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berupa daratan dengan luasnya mencapai 12.734.692 ha. Bentangan alam yang luas ini menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang lebih besar untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya.

Jika dilihat dari peruntukan kewasannya, sebagian besar luas sumber daya lahan Kalimantan Timur berstatus kawasan hutan dengan luasan mencapai 8.339.153 Ha (65,48%), sedangkan sisanya terbagi untuk kawasan industri seluas 57.176 Ha (0,45%), kawasan pariwisata darat seluas 97.442 Ha (0,77%), kawasan perikanan seluas 187.304 Ha (1,47%), kawasan perkebunan seluas 3.269.561 Ha (25,67%) kawasan permukiman seluas 396.266 Ha (3,11%), serta kawasan pertanian pangan, dan hortikultura sebesar 412.096 Ha (3,24%).

Berdasarkan ketinggian lahan di Provinsi Kalimantan Timur, terluas adalah wilayah pada ketinggian 100-500 m sebesar 4,23 juta Ha (terutama di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau), disusul wilayah pada ketinggian 25-100 m sebesar 4,12 Ha, dan wilayah pada ketinggian 0-25 m sebesar 2,08 Ha. Artinya wilayah di Kalimantan Timur cenderung didominasi oleh dataran rendah yang subur karena merupakan wilayah pengendapan. Sementara itu yang termasuk daerah dataran tinggi di Provinsi Kalimantan Timur (pada ketinggian 1000-1500 m) sebesar 2,02 juta Ha terutama pada Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jika dilihat dari kemiringan lahan di Provinsi Kalimantan Timur, wilayahnya didominasi dataran dengan kelas kemiringan 15-25% seluas 7,23 juta Ha termasuk kategori agak curam, terutama pada Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Berau. Selanjutnya luas wilayah pada kemiringan diatas 40% (curam) sebesar 2,91 juta Ha dan kemiringan 2-15% sebesar 1,82 juta Ha (datar dan landai).



Sumber: Perda No. 1 Tahun 2016 Tentang RTRW Provinsi Kaltim 2016-2035

**Gambar 3.2.** Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Peruntukan Kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Kemudian, dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, yaitu: Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu, serta memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kota, yaitu: Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.8.  
Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019



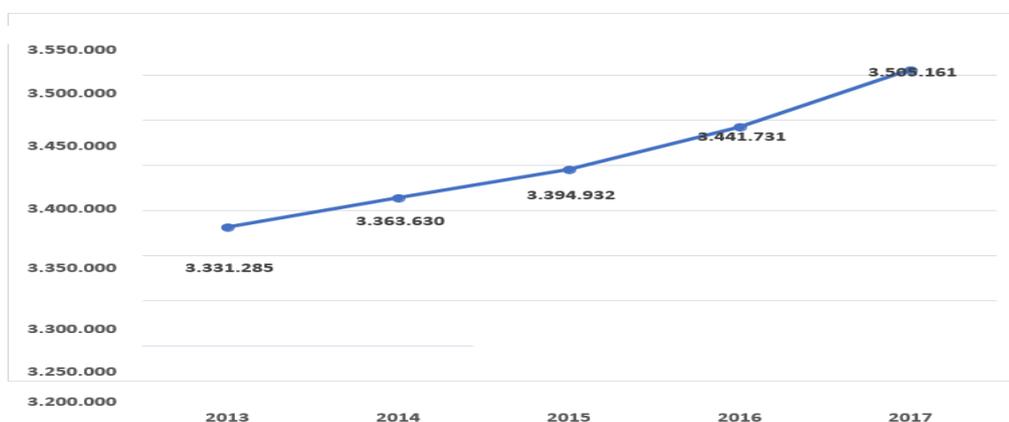
No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Ha)*	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan
1	Paser	1.109.696	10	144
2	Kutai Barat	1.370.992	16	194
3	Mahakam Ulu	1.944.941	5	50
4	Kutai Kartanegara	2.598.808	18	237
5	Kutai Timur	3.105.171	18	141
6	Berau	2.173.519	13	110
7	Penajam Paser Utara	292.373	4	54
8	Balikpapan	51.225	6	34
9	Samarinda	71.653	10	59
10	Bontang	16.314	3	15
<b>Kalimantan Timur</b>		<b>12.734.692</b>	<b>103</b>	<b>1.038</b>

Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka tahun 2020

Tabel 3.9  
Luas Wilayah, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk  
Provinsi Kalimantan Timur 2017

No	Kab/Kota	Penduduk			Sex ratio	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>	Laju Pertumbuhan Penduduk (2014-2017) (%)
		Laki-Laki	Perempuan	Total			
1	Paser	133.192	122.456	255.648	108,77	23,04	1,59
2	Kutai Barat	84.066	75.934	160.000	110,71	11,67	0,61
3	Kutai Kartanegara	353.323	321.436	674.759	109,92	25,96	0,85
4	Kutai Timur	227.826	190.799	418.625	119,41	13,48	0,36
5	Berau	118.392	103.444	221.836	114,45	10,21	1,68
6	Penajam Paser Utara	87.562	80.450	168.012	108,84	57,46	1,58
7	Balikpapan	323.614	309.582	633.196	104,53	1.236,11	1,44
8	Samarinda	394.435	375.197	769.632	105,13	1.074,11	1,41
9	Bontang	92.066	84.449	176.515	109,02	1.081,98	2,26
10	Mahakam Ulu	14.276	12.662	26.938	112,75	1,39	2,60
<b>Kalimantan Timur</b>		<b>1.828.752</b>	<b>1.676.409</b>	<b>3.505.161</b>	<b>109,09</b>	<b>27,52</b>	<b>1,04</b>

Sumber: Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur.  
Data Sex Ratio, Kepadatan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk adalah data diolah



Sumber: Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 3.3. Jumlah Penduduk Kalimantan Timur 2013-2017





Dengan memperhatikan kajian RT RW, pertumbuhan penduduk dan isu lingkungan hidup yang dihadapi provinsi Kalimantan Timur, Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur berperan untuk menyediakan hasil penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan untuk dasar kebijakan dalam RTRW dan mengangani isu lingkungan hidup.

### 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang sangat besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, maka ada beberapa isu sebagai berikut :

- 1) masih rendahnya daya saing SDM,
- 2) transformasi ekonomi berbasis SDA tidak terbarukan ke SDA terbarukan berjalan lambat baik secara vertikal maupun horisontal,
- 3) pengembangan infrastruktur belum optimal dalam mendukung peningkatan konektivitas wilayah,
- 4) penurunan kualitas lingkungan hidup, dan
- 5) pemerintah yang belum mencapai kinerja profesional dan akuntabel.
- 6) Penetapan Kaltm sebagai Ibu Kota Negara yang baru
- 7) Perkembangan Peraturan Perundangan dengan terbitnya antara lain Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal ini ditambah lagi dengan masalah eksternal seperti pencapaian SDG's, komitmen pemberantasan korupsi, dan koordinasi yang lemah antara provinsi dan kab/kota dalam pengendalian izin eksploitasi SDA.

Isu strategis yang ada di Provinsi Kalimantan Timur tersebut perlu mendapat perhatian terkait dengan kegiatan litbang.

Juga Kesepakatan Bersama (MoU) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan beberapa Lembaga Litbang Kementerian/Perguruan Tinggi/Pusat





Penelitian dan lain- lain telah dibuat yang perlu diperbaharui dan ditindaklanjuti secara kongkrit yaitu:

1. MoU dengan Badan Standardisasi Nasional tentang Pembinaan dan pengembangan Standardisasi di Kalimantan Timur.
2. MoU dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tentang Pengkajian, penerapan dan pemasyarakatan Teknologi untuk mendukung pembangunan daerah Prov. Kaltim.
3. MoU dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian tentang Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur.
4. MoU dengan Lembaga Ketahanan Nasional tentang Kerjasama dalam rangka peningkatan dan Pengembangan Ketahanan Nasional di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
5. MoU antara Balitbangda Prov. Kaltim dengan Dinas Perkebunan Prov. Kaltim, Universitas Mulawarman dengan Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Kaltim tentang Kerjasama Pembangunan Pusat Teknologi dan Informasi Kelapa Sawit.
6. MoU dengan Institut Pertanian Bogor tentang Pengembangan Ekonomi dan Wilayah berbasis Sumber Daya Lokal .
7. MoU dengan Lembaga Administrasi Negara tentang Penyelenggaraan Pendidikan Akademi dan Profesional, Pendidikan dan Pelatihan, Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.
8. MoU dengan Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian, Universitas Mulawarman tentang Kerjasama Pengembangan dan Penerapan hasil Litbang Teknologi Industri untuk mendukung Pembangunan Industri di Kalimantan Timur.
9. MoU dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. MoU dengan Badan Tenaga Atom Nasional.

Sedangkan fokus kelitbangkan kedepan terkait dengan IPTEK sebagaimana tertuang dalam program Kementerian Riset dan Teknologi yaitu :

- Kelitbangkan Teknologi Pangan





- Kelitbangan Teknologi Energi Alternatif dan Terbarukan
- Kelitbangan Manajemen Transportasi
- Kelitbangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Kelitbangan Kesehatan dan obat-obatan
- Kelitbangan Pertahanan Keamanan





## BAB IV

## TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan

Tujuan adalah misi yang ingin dicapai oleh suatu organisasi di masa yang akan datang. Tujuan Perangkat Daerah (PD) harus sejalan dengan tujuan pemerintahan. **Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur sebagai** Perangkat Daerah (PD) pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan mempedomani sasaran ke 26, misi ke 5 dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang berbunyi : **“Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien”**, sehingga guna mendukung tercapainya sasaran tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menetapkan tujuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

***“Meningkatkan Kinerja Kelitbangan Dalam Menghasilkan Hasil Penelitian untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Timur Serta Mendukung Ibu Kota Negara yang Ramah Lingkungan dan Terintegrasi”***.

Adapun Penjabaran Tujuan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, memiliki pengertian bahwa Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen bahwa hasil-hasil kelitbangan yang dihasilkan oleh Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur memiliki kualitas dalam mendukung setiap langkah pemerintah untuk ***Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Timur***, dan ***Mendukung Ibu Kota Negara yang Ramah Lingkungan dan Terintegrasi***, memiliki pengertian bahwa Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur memberikan sumbangsuhnya untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui rekomendasi kebijakan yang inovatif dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), meliputi permasalahan ekonomi, sosial dan pemerintaha dan pengembangan inovasi dan teknologi.

Mendukung Birokrasi yang efektif dan efisien yakni bahwa Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur berperan sebagai perencana, pelaksana dan





pengawas kebijakan yang efektif dan efisien atau tepat guna dan sesuai waktu/target (jika tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya berhasil tercapai).

Tujuan besar ini memiliki pengertian yang mempunyai pandangan jauh ke depan, agar keberadaan Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur menjadi lebih inovatif dan antisipatif. Tujuan tersebut juga merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan kegiatan kelitbangan untuk mendukung percepatan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 yaitu : **“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”**.

Untuk mewujudkan tujuan Balitbangda maka disusunlah misi dari Balitbangda. Dalam rangka mewujudkan misi pembangunan Kalimantan Timur 2019-2023, setelah ditelaah, ternyata semua misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan tugas pokok penelitian dan pengembangan, maka Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur juga memiliki 5 Misi yaitu :

1. Menghasilkan Penelitian Yang Berkualitas dan Dapat Dipertanggungjawabkan.
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Daerah.
3. Mewujudkan Konektivitas Pembangunan Antar Daerah Kabupaten / Kota.
4. Memberikan Informasi dan Data Akurat Berdasarkan Hasil Penelitian
5. Mengoptimalkan Sumber Daya Untuk Peningkatan Kelitbangan

Maksud dari misi-misi di atas ini adalah bahwa Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan penelitian dan pengembangan untuk bahan rekomendasi kepada Gubernur Kalimantan Timur dan *Stakeholder* sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan melalui kegiatan kelitbangan utama (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan), pendukung (peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program, fasilitasi inovasi daerah, pengembangan basis data kelitbangan, penguatan kerjasama kelitbangan, pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya), dan penunjang (fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi).





## 4.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Sasaran harus spesifik, terukur, jelas kriterianya dan memiliki indikator yang rinci sehingga bisa tercapai secara efektif dan efisien.

Sasaran Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur yakni .:

1. Meningkatnya Kinerja Balitbangda yang menghasilkan Penelitian untuk Kesejahteraan Masyarakat, dan
2. Meningkatnya Hasil penelitian yang mendukung pembangunan Ibu Kota Negara.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Balitbangda beserta indikator sasarannya Tahun 2019-2023 disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini :



Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan Jangka Menengah Pelayanan  
Balitbangda Prov. Kalimantan Timur Tahun 2019-2020 Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006**

No (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator sasaran (4)	Program (5)	Kegiatan (6)
<b>Misi 1:</b> Menghasilkan rekomendasi hasil kelitbangan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah					
	"Terwujudnya Hasil Kelitbangan yang Berkualitas dan Inovatif untuk Mendukung Birokrasi yang Efektif dan Efisien"	Meningkatnya Kualitas Kelitbangan Dalam Mendukung Pemerintahan Daerah.	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Program Litbang Bidang Sosial pemerintahan	Kegiatan Litbang Bidang Sosial Pemerintahan
				Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kegiatan Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan
				Program Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Kegiatan Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi
<b>MISI 2 :</b> Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan daya saing daerah melalui Penguatan Inovasi Daerah					
	Terwujudnya Hasil Kelitbangan yang Berkualitas dan Inovatif untuk Mendukung Birokrasi yang Efektif dan Efisien"	Meningkatnya Kemampuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) secara Konsisten	Persentase PD yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah  Persentase Kebijakan Inovasi Daerah yang Diterapkan di Daerah	Program Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Kegiatan Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi





No (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator sasaran (4)	Program (5)	Kegiatan (6)
<b>Misi 3 : Meningkatkan kapasitas kelitbangan di Provinsi Kalimantan Timur</b>					
	Memfasilitasi kegiatan kelitbangan pemerintahan dan pembangunan serta inoovasi daerah.	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelitbangan di Provinsi Kalimantan Timur	Persentase meningkatnya pelayanan PD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran
			Persentase meningkatnya pelayanan unit kerja PD	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan pemeliharaan dan peralatan sarana dan prasarana kantor Balitbangda Prov. Kaltim
			Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja PD	Program penyusunan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi penyelenggraan pemerintahan	Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan dan Anggaran
					Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
<b>Misi 4 : Meningkatkan kapasitas dan kerjasama kelitbangan dengan akademisi, bisnis, pemerintahan dan komunitas (ABGC)</b>					
	Terciptanya Sinkronisasi	Peningkatan kapsitas	Persentase meningkatnya kapasitas dan kerjasama	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur





No (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator sasaran (4)	Program (5)	Kegiatan (6)
	dan Harmonisasi Kerjasama Antar	dan kerjasama antar lembaga kelitbangan	kelembagaan Balitbangda, SDM dan fasilitas pendukung.	Pemerintahan Daerah	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan
<b>MISI 5 : Menyebarluaskan hasil kelitbangan dan inovasi daerah kepada para pihak</b>					
	Menyediakan dan menyebarluaskan hasil kelitbangan dan inovasi daerah	Tersedianya hasil kelitbangan dan inovasi daerah kepada <i>stakeholder</i> .	Tersedianya <i>database</i> kelitbangan dan inovasi daerah berbasis <i>web</i> yang berkualitas	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pengembangan teknologi informasi kelitbangan Rakorda kelitbangan





**Tabel 4.2**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Kegiatan Jangka Menengah Pelayanan**  
**Balitbangda Prov. Kalimantan Timur Tahun 2021 -2023 Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Satker Penanggung Jawab
	Meningkatkan Kinerja Kebalitbangdan Dalam Menghasilkan Hasil Penelitian untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Timur dan Mendukung Ibu Kota Negara yang Ramah Lingkungan dan Terintegrasi.	Meningkatnya Kinerja Balitbangda yang Menghasilkan Penelitian untuk Kesejahteraan Masyarakat.	Persentase Hasil kelitbangdan yang dihasilkan untuk pembangunan dan kesjahteraan masyarakat	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	Bidang Sosial dan Pemerintahan



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Satker Penanggung Jawab
					Aparatur dan Reformasi Birokrasi	
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	Bidang Sosial dan Pemerintahan



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Satker Penanggung Jawab
					Keuangan dan Aset Desa	
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian Bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian Oleh Instansi yang Berwenang	Bidang Sosial dan Pemerintahan
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan	Bidang Sosial dan Pemerintahan



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Satker Penanggung Jawab
					Perlindungan Anak	
					Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Bidang Sosial dan Pemerintahan
					Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Bidang Sosial dan Pemerintahan





No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Satker Penanggung Jawab
					Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Bidang Sosial dan Pemerintahan
				Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Bidang Ekonomi dan Pembangunan





No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Satker Penanggung Jawab
					Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Bidang Ekonomi dan Pembangunan
					Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Bidang Ekonomi dan Pembangunan
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bidang Inovasi dan Teknologi
					Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Bidang Inovasi dan Teknologi
					Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Bidang Inovasi dan Teknologi





No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Satker Penanggung Jawab
					Yang Bersifat Inovatif	
					Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Bidang Inovasi dan Teknologi
					Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Bidang Inovasi dan Teknologi
		Meningkatnya Hasil Penelitian yang Mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara.	Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dalam mendukung pembangunan IKN	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Sosial dan Pemerintahan
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bidang Ekonomi dan Pengembangan
					Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Bidang Ekonomi dan Pengembangan
					Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Bidang Ekonomi dan Pengembangan
					Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Bidang Ekonomi dan Pengembangan



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Satker Penanggung Jawab
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Bidang Inovasi dan Teknologi
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sekretariat
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretariat
				Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat
				Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sekretariat
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sekretariat
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sekretariat
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Sekretariat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Satker Penanggung Jawab
					SKPD	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel	Sekretariat
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sekretariat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sekretariat
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sekretariat
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraDinas Jabatan	Sekretariat
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Sekretariat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Sub Kegiatan	Sub Satker Penggung Jawab
					Dinas Operasional atau Lapangan	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sekretariat
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Sekretariat
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat





**Tabel 4.3**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Balitbangda Prov. Kalimantan Timur Tahun 2019-2020**  
**Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	"Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien".	Meningkatnya Kualitas Kelitbangan Dalam Mendukung Pemerintahan Daerah.	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	30%	30%	30%	30%	30%
		Meningkatnya Kemampuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) secara Konsisten	Persentase PD yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	30%	30%	30%	30%	30%
			Persentase Kebijakan Inovasi Daerah yang Diterapkan di Daerah	30%	30%	30%	30%	30%
	Memfasilitasi kegiatan kelitbangan pemerintahan dan pembangunan serta inoovasi daerah.	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelitbangan di Provinsi Kalimantan Timur	Persentase meningkatnya kapasitas kelembagaan Balitbangda, SDM dan fasilitas pendukung.	<b>78 (BB)</b>	<b>79 (BB)</b>	<b>79 (BB)</b>	<b>80 (AA)</b>	<b>81 (AA)</b>





No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Persentase meningkatnya pelayanan PD	80%	85%	90%	95%	100%
			Persentase meningkatnya pelayanan unit kerja PD	80%	90%	100%	100%	100%
			Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja PD	78 (BB)	79 (BB)	79 (BB)	80 (AA)	81 (AA)
	<b>Terciptanya Sinkronisasi dan Harmonisasi Kerjasama antar lembaga litbang</b>	Peningkatan kerjasama antar lembaga kelitbangan	Jumlah jejaring kerja ( <i>networking</i> ) kelitbangan dan inovasi daerah	<b>4 Jejaring Kerja</b>	<b>5 Jejaring Kerja</b>	<b>6 Jejaring Kerja</b>	<b>7 Jejaring Kerja</b>	<b>8 Jejaring Kerja</b>
	Menyediakan dan menyebarluaskan hasil kelitbangan dan inovasi daerah	Tersedianya hasil kelitbangan dan inovasi daerah kepada <i>stakeholder</i> .	Persentase tersedianya <i>database</i> kelitbangan dan inovasi daerah berbasis <i>web</i> yang berkualitas	<b>3 Media Informasi</b>	<b>3 Media Informasi</b>	<b>3 Media Informasi</b>	<b>3 Media Informasi</b>	<b>3 Media Informasi</b>
		Tersebarluaskannya hasil kelitbangan dan inovasi daerah kepada <i>stakeholder</i>	Persentase meningkatnya penyebaran hasil kelitbangan (press release, sosialisasi, diseminasi dan peragaan)	<b>80%</b>	80%	80%	80%	80%





Tabel 4.4

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Balitbangda Prov. Kalimantan Timur Tahun 2021-2023  
Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatkan Kinerja Kealitbangan Dalam Menghasilkan Hasil Penelitian untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Timur dan Mendukung Ibu Kota Negara yang Ramah Lingkungan dan Terintegrasi.	Meningkatnya Kinerja Balitbangda yang Menghasilkan Penelitian untuk Kesejahteraan Masyarakat.	Persentase Hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat			100%	100%	100%
		Meningkatnya Hasil Penelitian yang Mendukung Pembangunan Ibu Kota Negara.	Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dalam mendukung pembangunan IKN			100%	100%	100%







## BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan 4 (empat) strategi serta arah kebijakannya dalam pelaksanaan rencana program dan kegiatan Tahun 2019-2023, hal ini diuraikan sebagai berikut:

- 1. Strategi Pertama : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kelitbangan** Balitbangda Prov. Kalimantan Timur berkomitmen dan konsisten dalam melakukan kegiatan kelitbangan yang berkualitas dan didukung oleh SDM serta output yang dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam pengambilan kebijakan bagi Kepala Daerah dalam pelaksanaan pembangunan.

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran :

- Meningkatnya kualitas kelitbangan dalam mendukung pemerintahan daerah.

Adapun kebijakan untuk mendukung strategi ini adalah :

- Menetapkan rencana kelitbangan sesuai prioritas dalam RPJMD 2019-2023 serta perkembangan isu-isu aktual di daerah.
- Kebijakan kelitbangan 1 (satu) pintu dengan Balitbangda selaku koordinator kegiatan kelitbangan di Provinsi Kalimantan Timur.

- 2. Strategi Kedua : Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM penyelenggaraan kelitbangan.**

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran :

- Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelitbangan di Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun kebijakan untuk mendukung strategi ini adalah :

- Optimalisasi kegiatan peningkatan kapasitas kelitbangan melalui bimtek dan pelatihan ASN.

- 3. Strategi Ketiga : Mengoptimalkan pemberdayaan jejaring kerja dan inovasi daerah.**

Optimalisasi pemberdayaan jejaring kerja dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas Lembaga dan SDM guna menunjang dan mendukung pelaksanaan kelitbangan daerah.

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran

- Meningkatkan Kerjasama antar lembaga kelitbangan.

Adapun kebijakan untuk mendukung strategi ini adalah :

- Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi (KISS) melalui forum kelitbangan, FKPPD, Rakorda, Rakornas.

#### 4. Strategi Keempat : Mengoptimalkan pengelolaan database kelitbangan dan inovasi daerah.

Optimalisasi pengelolaan database kelitbangan dan inovasi daerah dibutuhkan sebagai dokumen internal Balitbangda Provinsi Kaltim dan pemenuhan ketentuan keterbukaan informasi publik.

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran :

- Termanfaatkannya hasil kelitbangan dan inovasi daerah oleh *stakeholder*.
- Tersebarluaskannya hasil kelitbangan dan inovasi daerah kepada *stakeholder*.

Adapun kebijakan untuk mendukung strategi ini adalah :

- Dibentuknya aplikasi media informasi kelitbangan berbasis web.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 disajikan dalam Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Badan Penelitiandan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

Misi : Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan Kinerja Kelitbangan Dalam Menghasilkan Hasil Penelitian Untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Timur Serta Mendukung Ibu Kota Negara Yang Ramah Lingkungan dan Terintegrasi	1. Kinerja Balitbangda yang menghasilkan Penelitian untuk Kesejahteraan Masyarakat Daerah. 2. Hasil penelitian yang mendukung pembangunan Ibu Kota Negara.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kelitbangan	Menetapkan rencana kelitbangan sesuai prioritas dalam RPJMD 2019-2023, dan isu-isu aktual di daerah
			Kebijakan kelitbangan 1 (satu) pintu dengan Balitbangda selaku koordinator kegiatan kelitbangan di Provinsi Kalimantan Timur
			Optimalisasi kegiatan peningkatan kapasitas kelitbangan melalui bimtek dan pelatihan ASN
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM penyelenggaraan kelitbangan	Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi (KISS) melalui forum kelitbangan, FKPPD, Rakorda, Rakornis.
		Mengoptimalkan pembedayaan jejaring kerja dan inovasi daerah	Dibentuknya aplikasi media informasi kelitabngan berbasis web
		Mengoptimalkan pengelolaan database kelitbangan dan inovasi daerah	Dibentuknya aplikasi media informasi kelitbangan berbasis web.



## BAB VI

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2019-2023) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Balitbangda Prov. Kaltim dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kalimantan Timur 2019-2023.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok.

1. Program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Balitbangda.
2. Program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan Balitbangda sehari-hari pada seluruh bidang.

### Rencana Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian strategi untuk mencapai sasaran Renstra PD dibutuhkan program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja yang digunakan dalam rencana strategis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Bidang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 6.1 berikut ini.

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program dan Kegiatan Strategi Bidang pada**  
**Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2019-2020**

No	Strategi/Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
	<b>Sasaran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Kualitas Kelitbangan Dalam Mendukung Pemerintahan Daerah.</li> <li>Meningkatnya Kemampuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) secara Konsisten</li> </ul>	
<b>S1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kelitbangan</b>			
<b>S2 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem inovasi daerah (SIDa)</b>			
	K: Menetapkan rencana kelitbangan sesuai prioritas dalam RPJMD 2019-2023, Kebijakan Strategi Daerah (JAKSTRADA), dan	<b>Program Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan</b>	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang sosial dan pemerintahan
	K : Intergrasi SIDA dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.		
	K: Kebijakan Kelitbangan satu pintu.		
	K : Optimalisasi dan reviu roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sesuai perubahan lingkungan strategis	Kegiatan Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah laporan litbang sub bidang kependudukan, pemberdayaan dan masyarakat desa yang dilaksanakan
			Jumlah laporan Litbang Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Yang Dilaksanakan
			Jumlah laporan Litbang Sub Bidang Sosial dan Budaya Yang Dilaksanakan
		Kegiatan Penelitian Mandiri Bidang Sosial dan Pemerintahan	Jumlah laporan penelitian mandiri fungsional peneliti bidang sosial dan pemerintahan yang dilaksanakan



		<b>Program Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang ekonomi dan pembangunan
		Kegiatan Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Laporan Litbang Sub Bidang Ekonomi yang dilaksanakan
			Jumlah Laporan Litbang Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan
			Jumlah laporan Litbang Sub Bidang pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana yang dilaksanakan
		Kegiatan Penelitian Mandiri Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah laporan penelitian mandiri fungsional peneliti bidang ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan
		<b>Program Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi</b>	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang inovasi dan teknologi
		Kegiatan Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan litbang sub bidang Inovasi dan pengembangan teknologi yang dilaksanakan
			Jumlah laporan litbang sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi yang dilaksanakan
			Jumlah laporan litbang sub bidang diseminasi kelitbangan yang dilaksanakan
		Kegiatan Penelitian Mandiri Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan pelaksanaan penelitian mandiri bidang inovasi dan teknologi

**Tabel 6.2**  
**Rencana Program dan Kegiatan Strategi Bidang pada**  
**Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2021-2023**

No	Strategi/Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
	<b>Sasaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Kinerja Balitbangda yang menghasilkan Penelitian untuk Kesejahteraan Masyarakat, dan</li> <li>Meningkatnya Hasil penelitian yang mendukung pembangunan Ibu Kota Negara.</li> </ol>	
<b>S1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kelitbangan</b>			
	K: Menetapkan rencana kelitbangan sesuai prioritas dalam RPJMD 2019-2023	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	Persentase Hasil Penelitian yang disampaikan ke Perangkat Daerah
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
	K: Kebijakan Kelitbangan satu pintu.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi
		<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	Persentase Hasil Penelitian yang disampaikan ke Perangkat Daerah dalam mendukung pembangunan IKN
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi dalam mendukung pembangunan IKN

Dalam rangka mendukung pencapaian strategi untuk mencapai sasaran Renstra PD program dan kegiatan manajerial dan perkantoran terhadap penyelenggaraan PD sehari-hari seluruh bidang dibutuhkan program dan kegiatan, sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 6.2 di bawah ini :

**Tabel 6.2**

**Rencana Program dan Kegiatan Manajerial dan Perkantoran  
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2020**

No	Strategi/kebijakan	Program/kegiatan	Indikator kinerja
	<b>Sasaran :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelitbangan di Provinsi Kalimantan Timur</li> <li>- Meningkatnya kerjasama antar lembaga kelitbangan</li> <li>- Tersedianya hasil kelitbangan dan inovasi daerah kepada stakeholder</li> <li>- Tersebarluaskannya hasil kelitbangan dan inovasi daerah kepada stakeholder</li> </ul>	
<b>S3 : Mengoptimalkan pengelolaan <i>database</i> kelitbangan dan inovasi daerah</b> <b>S4 : mengoptimalkan pemberdayaan jejaring kerja dan inovasi daerah</b> <b>S5 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM penyelenggaraan kelitbangan.</b>			
	K : Dibentuknya aplikasi media informasi kelitbangan	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	Persentase teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal
		Kegiatan pengembangan teknologi informasi kelitbangan	Persentase terselenggaranya program pemanfaatan teknologi informasi kelitbangan  Jumlah artikel jurnal riset pembangunan dan buletin lembusuaana
		Kegiatan Rakorda Kelitbangan	Persentase terselenggaranya kegiatan Rakorda Kelitbangan
	K : Optimalisasi kegiatan peningkatan kapasitas	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)
		kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran	Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu



No	Strategi/kebijakan	Program/kegiatan	Indikator kinerja
		Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapanm Sarana Dan Prasarana	Jumlah kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana
		<b>Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi</b>
		Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan peningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur
		<b>Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Nilai akuntabilitas kinerja PD</b>
		Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran
		Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	Jumlah laporan evaluasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
	K : Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi (KISS) melalui forum	<b>Program Peningkatan Kerjasama Jejaring kerja (networking) kelitbangan dan inovasi daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya Kerjasama Jejaring kerja (networking) kelitbangan dan inovasi daerah</b>
		Kegiatan Jejaring kerja (networking) kelitbangan dan inovasi daerah	Jumlah Kegiatan Jejaring kerja (networking) kelitbangan dan inovasi daerah

Tabel 6.3

**Rencana Program dan Kegiatan Manajerial dan Perkantoran  
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023**

No	Strategi/kebijakan	Program/kegiatan	Indikator kinerja
	<b>S2 : Mengoptimalkan pengelolaan <i>database</i> kelitbangan dan inovasi daerah</b> <b>S3 : mengoptimalkan pemberdayaan jejaring kerja dan inovasi daerah</b> <b>S4 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM penyelenggaraan kelitbangan.</b>		
	K : Dibentuknya aplikasi media informasi kelitbangan berbasis web	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
	K : Optimalisasi kegiatan peningkatan kapasitas kelitbangan melalui bimtek dan pelatihan ASN	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu
	K : Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi (KISS) melalui forum kelitbangan, FKPPD, Rakorda, Rakornis.	Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu
	K : Dibentuknya aplikasi media informasi kelitabngan berbasis web	Administrasi Umum	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu

**Pendanaan Indikatif**

Untuk merealisasikan program dan kegiatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu didukung oleh dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Adapun pendanaan indikatif tercantum pada tabel 6.4 sebagaimana berikut :





Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Rsntra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Target			Rp
	(IPTEKIN) secara Konsisten	3. Persentase Kebijakan 3. Persentase Kebijakan Inovasi Daerah yang Diterapkan di Daerah		Jumlah laporan Litbang Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Yang Dilaksanakan	0 laporan	1 laporan	35.760.000	1 laporan	39.930.500								2 laporan		
				Jumlah laporan Litbang Sub Bidang Sosial Dan Budaya Yang Dilaksanakan	0 laporan	1 laporan	99.215.000	1 laporan	148.733.500								2 laporan		
			4. Kegiatan penelitian mandiri bidang sosial dan pemerintahan	0 laporan	7 laporan	136.500.000	7 laporan	120.000.000								12 laporan	256.500.00		





Perubahan Rencana Strategis  
Balitbangda 2019-2023



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Rsntra PD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
				Prasarana yang dilaksanakan																
			Kegiatan penelitian mandiri bidang ekonomi dan pembangunan	Jumlah laporan penelitian mandiri fungsional peneliti bidang ekonomi dan pembangunan yang dilaksanakan	0 laporan	5 laporan	93.500.000	6 laporan	120.000.000								11 laporan	213.500.000		
			Program Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Persentase rekomendasi yang dihasilkan litbang bidang inovasi dan teknologi	0%	70%	270.000.000	80%	330.000.000								100%	600.000.000	Bid. Intek	Dalam dan Luar Prov. Kaltim
			Kegiatan Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan litbang sub bidang Inovasi dan pengembangan teknologi yang dilaksanakan	0 laporan	1 laporan	67.000.000	1 laporan	125.000.000								2 laporan	450.000.000		



Perubahan Rencana Strategis  
Balitbangda 2019-2023



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Rsntra PD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
				Jumlah laporan litbang sub bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi yang dilaksanakan	0 laporan	1 laporan	66.500.000	1 laporan	125.000.000								2 laporan			
				Jumlah laporan litbang sub bidang diseminasi kelitbangan yang dilaksanakan	0 laporan	1 laporan	66.500.000										1 laporan			
				Kegiatan penelitian mandiri bidang inovasi dan teknologi	0 laporan	4 laporan	70.000.000	1 laporan	80.000.000								5 laporan	150.000.000		
Memfasilitasi kegiatan kelitbangan	Terlaksananya kegiatan peningkatan	Meningkatnya nilai akuntabilitas	Program Penyusunan Dokumen	Nilai akuntabilitas kinerja PD		78 (BB)	174.620.000	79 (BB)	99.620.000								81 (A)	274.240.000	Sekretariat	Prov. Kaltim



Perubahan Rencana Strategis  
Balitbangda 2019-2023



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Rsntra PD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp			Target	Rp
pemerintahan dan pembangunan serta inoovasi daerah.	kapasitas kelitbang di Provinsi Kalimantan Timur	kinerja PD	Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan																
			Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	0 dokumen	10 dokumen	103.120.000	10 dokumen	28.120.000							20 dokumen	131.240.000		
			Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan evaluasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	0 laporan	23 laporan	71.500.000	23 laporan	71.500.000							115 laporan	143.000.000		
	Persentase meningkatnya pelayanan PD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	0%	80%	1.299.575.000	85%	1.376.795.000							100%	2.676.370.000	Sekretariat	Samari nda	



Perubahan Rencana Strategis  
Balitbangda 2019-2023



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penerimaan Jawa b	Lokasi		
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Rsntra PD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran	Jumlah kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran	0 kegiatan	15 Kegiatan	1.299.575.000	15 Kegiatan	1.376.795.000							15 Kegiatan	2.676.370.000		
	Persentase meningkatnya pelayanan unit kerja PD	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	0 unit	2 Unit	446.450.000	3 Unit	526.650.000								5 Unit	973.100.000	Sekretariat	Samarinda
		Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Sarana Dan Prasarana	Jumlah kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana	0 kegiatan	8 Kegiatan	446.450.000	8 Kegiatan	526.650.000								8 Kegiatan	973.100.000		
	Persentase meningkatnya kapasitas kelembagaan Balitbangda, SDM dan	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	0 %	80%	789.785.000	81 %	956.815.000								100%	1.746.600.000	Sekretariat	Prov. Kaltim





Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Rsntra PD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		fasilitas pendukung.																	
			Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	0 orang	77 Orang	200.000.000	130 Orang	904.265.000							207 orang	1.104.265.000		
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur	0 Orang	10 Orang	87.450.000	11 Orang	52.550.000							21 Orang	140.000.000		
Menyediakan dan menyebarkan hasil penelitian dan inovasi daerah	Tersedia hasil kelitbang dan inovasi daerah kepada stakeholders	Tersedia database kelitbang dan inovasi daerah berbasis web yang berkualitas	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase teknologi yang dapat dimanfaatkan dengan optimal	0%	80%	129.420.000	80%	270.120.000							100%	399.540.000	Sekretariat	Samarinda



Perubahan Rencana Strategis  
Balitbangda 2019-2023



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Rsntra PD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		as																	
	Tersebar luaskannya hasil kelitbang dan inovasi daerah kepada stakeholder	Meningkatnya penyebaran hasil kelitbang (press release, sosialisasi, diseminasi dan peragaan)																	
			Kegiatan pengembangan teknologi informasi kelitbang	Persentase terselenggaranya program pemanfaatan teknologi informasi kelitbang	0%	80%	6.000.000	80%	107.550.000							100%	150.100.000		
				Jumlah artikel jurnal riset pembangunan dan bulletin lembusuan	0 artikel	70 artikel	36.550.000	70 artikel							80 artikel				



Perubahan Rencana Strategis  
Balitbangda 2019-2023



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Rsntra PD					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			Kegiatan Rakorda Kelitbang an	Persentase terselenggara nya kegiatan Rakorda Kelitbanga n	0%	100%	86.870.000	100%	162.570.000									100%	249.440.000		





Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) Dan Kegiatan (Output)	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pd Akhir periode Rsntra PD	
								-2019		-2020		-2021		-2022		-2023				Target	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Permbangunan	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							1 laporan	170.006.300	1 laporan	650.000.000	2 laporan	820.006.300	Perangkat Daerah Prov. Kaltim & Kab. /Kota	Kab./Kota & Prov. Kaltim	
					Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan							1 laporan	165.070.000	1 laporan	650.000.000	2 laporan	815.070.000	Perangkat Daerah Prov. Kaltim & Kab. /Kota	Kab./Kota & Prov. Kaltim	
					Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah							1 laporan	164.923.700	1 laporan	650.000.000	2 laporan	814.923.700	Perangkat Daerah Prov. Kaltim & Kab. /Kota	Kab./Kota & Prov. Kaltim	
					Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 laporan	280.090.000				1 laporan	375.000.000	3 laporan	655.090.000	Perangkat Daerah Prov. Kaltim & Kab. /Kota	Kab./Kota & Prov. Kaltim	
					Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan									1 laporan	350.000.000	2 laporan	350.000.000	Perangkat Daerah Prov. Kaltim & Kab. /Kota	Kab./Kota & Prov. Kaltim	
					Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral				1 laporan	279.100.000				1 laporan	450.000.000	3 laporan	729.100.000	Perangkat Daerah Prov. Kaltim & Kab. /Kota	Kab./Kota & Prov. Kaltim	
					Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup									1 laporan	400.000.000	2 laporan	400.000.000	Perangkat Daerah Prov. Kaltim & Kab. /Kota	Kab./Kota & Prov. Kaltim	
					Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan									1 laporan	350.000.000	2 laporan	350.000.000	Perangkat Daerah Prov. Kaltim & Kab. /Kota	Kab./Kota & Prov. Kaltim	
					Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				2 laporan	637.184.500				1 laporan	650.000.000	4 laporan	1.287.184.500	Perangkat Daerah Prov. Kaltim & Kab. /Kota	Kab./Kota & Prov. Kaltim	
					Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan									1 laporan	650.000.000	2 laporan	650.000.000	Perangkat Daerah Prov. Kaltim & Kab. /Kota	Kab./Kota & Prov. Kaltim	
					Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman									1 laporan	650.000.000	2 laporan	650.000.000	Perangkat Daerah Prov. Kaltim & Kab. /Kota	Kab./Kota & Prov. Kaltim	
					Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan									1 laporan	750.000.000	2 laporan	750.000.000	Perangkat Daerah Prov. Kaltim & Kab. /Kota	Kab./Kota & Prov. Kaltim	
					Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika									1 laporan	500.000.000	2 laporan	500.000.000	Perangkat Daerah Prov. Kaltim & Kab. /Kota	Kab./Kota & Prov. Kaltim	
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Laporan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Inovasi dan Teknologi								3 laporan	500.000.000	2 laporan	4.250.000.000	5 laporan	4.750.000.000	Perangkat Daerah Prov. Kaltim & Kab. /Kota	Kab./Kota & Prov. Kaltim
					Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan	Jumlah rancang bangun yang diuji cobakan				1 RB	158.250.000				2 RB	200.500.000.000	3 RB	200.658.250.000	Perangkat Daerah Prov. Kaltim & Kab. /Kota	Kab./Kota & Prov. Kaltim	
					Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Inovasi Daerah yang di terapkan di Pemprov. Kaltim				12 inovasi	398.900.000				50 inovasi	500.000.000	62 inovasi	898.900.000	Perangkat Daerah Prov. Kaltim & Kab. /Kota	Kab./Kota & Prov. Kaltim	
					Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Rakor Kelitbangan				1 laporan	147.715.000		1 laporan	177.258.000	1 laporan	212.709.600	3 laporan	537.682.600	Perangkat Daerah Prov. Kaltim & Kab. /Kota	Kab./Kota & Prov. Kaltim	
						Jumlah hasil kelitbangan yang di Diseminasikan				25 hasil	120.750.000				50 hasil	410.000.000	75 hasil	530.750.000	Perangkat Daerah Prov. Kaltim & Kab. /Kota	Kab./Kota & Prov. Kaltim	
						Jumlah artikel jurnal yang diterbitkan				20 artikel	115.000.000				20 artikel	150.000.000	40 artikel	265.000.000	Perangkat Daerah Prov. Kaltim & Kab. /Kota	Kab./Kota & Prov. Kaltim	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) Dan Kegiatan (Output)	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pad Akhir periode Rsntra PD	
								-2019		-2020		-2021		-2022		-2023					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan					14 Dokumen	11.038.257.632	14 Dokumen	12.121.189.430	14 Dokumen	14.545.427.316	42 Dokumen	37.704.874.378	Balitbangda	Samarinda	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal					10 orang	35.000.000			15 orang	50.400.000	37 orang	85.400.000	Balitbangda	Samarinda	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik		Jumlah bulan untuk kegiatan administrasi umum yang terlaksana					12 bulan	2.507.343.193	12 bulan	2.462.249.429	12 bulan	2.954.699.315	36 bulan	7.924.291.937	Balitbangda	Samarinda	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen penyediaan barang cetak dan penggandaan					12 dokumen	81.275.568	12 dokumen	174.730.209	12 dokumen	209.676.251	12 dokumen	465.682.028	Balitbangda	Samarinda	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan					27 jenis	19.090.395			17 jenis	27.490.169	44 jenis	46.580.564	Balitbangda	Samarinda	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan					8 unit	14.007.200			12 unit	20.170.368	20 unit	34.177.568	Balitbangda	Samarinda	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan					27 Jenis	39.999.925	12 jenis	109.519.220	27 Jenis	57.599.892	30 jenis	207.119.037	Balitbangda	Samarinda	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi					12 laporan	2.352.970.105	12 laporan	2.178.000.000	12 laporan	3.388.276.951	36 laporan	7.919.247.056	Balitbangda	Luar Prov Kaltim	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana							56 unit	310.452.500	unit	-	unit	447.051.600	56 unit	757.504.100	Balitbangda	Samarinda	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan					3 unit	49.800.000			4 unit	71.712.000	7 unit	121.512.000	Balitbangda		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan					16 unit	186.652.500			23 unit	268.779.600	39 unit	455.432.100	Balitbangda	Samarinda	
					Pengadaan Mebel	jumlah mebelair yang diadakan					37 unit	74.000.000			72 unit	106.560.000	109 unit	180.560.000	Balitbangda	Samarinda	
			Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana							12 bulan	1.731.085.675	12 bulan	2.416.737.041	12 bulan	2.014.406.144	36 bulan	6.162.228.860	Balitbangda	Samarinda	
					Penyediaan Jasa Surat Memurat	Jumlah surat menyurat yang dilaksanakan					100 surat	7.500.000	100	10.000.000	144 surat	10.800.000	364 surat	28.300.000	Balitbangda		
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan daftar gaji non ASN					13 laporan	1.417.354.750	13 laporan	2.166.240.936	13 laporan	1.562.633.612	13 laporan	5.146.229.298	Balitbangda	Samarinda	
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik					12 laporan	306.230.925	12 laporan	240.496.105	12 laporan	440.972.532	36 laporan	987.699.562	Balitbangda	Samarinda	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) Dan Kegiatan (Output)	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pad Akhir periode Rsntra PD	
								-2019		-2020		-2021		-2022		-2023					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Rp	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana milik daerah						5 kegiatan	351.138.000	5 kegiatan	457.024.100	5 kegiatan	605.638.720	15 kegiatan	1.413.800.820	Balitbangda	Samarinda		
				penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara					1 unit	29.550.000			1 unit	42.552.000	1 unit	72.102.000	Balitbangda	Samarinda		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional					25 unit	88.350.000	27 unit	131.064.100	30 unit	127.224.000	82 unit	346.638.100	Balitbangda	Samarinda		
				pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah luasan pemeliharaan gedung kantor					772,44 m2	154.488.000	850 m2	170.000.000	1.112,31 m2	222.462.720	2.735 m2	546.950.720	Balitbangda	Samarinda		
				Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya					52 unit	35.000.000			75 unit	50.400.000	127 unit	85.400.000	Balitbangda	Samarinda		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	luas areal yang dilakukan pemeliharaan					-	-	7.000 m2	91.000.000	7.000 m2	100.000.000	7.000 m2	191.000.000				
				pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara					1 unit	43.750.000	1 unit	64.960.000	1 unit	63.000.000	1 unit	171.710.000	Balitbangda	Samarinda		
											19.558.892.000	0	19.000.000.000	0	238.612.246.195		277.171.138.195				

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2023 adalah seperti disajikan berikut ini:

1. Mewujudkan masyarakat yang berkarakter, berakhlak mulia dan berdaya saing (dengan 3 sasaran)
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat (dengan 3 sasaran)
3. Meningkatkan ekonomi kerakyatan (dengan 3 sasaran)
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi berkelanjutan (dengan 8 sasaran)
5. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan infrastruktur dasar (5 sasaran)
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup (3 sasaran)
7. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik (dengan 7 sasaran)

Indikator kinerja Balitbangda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Balitbangda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1. berikut ini.



**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur**  
**yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019-2020 (hingga juni 2020)**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbang	0%	30%	30%				60%
2	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	0 %	30%	30%				60%
3	Persentase Kebijakan Inovasi Daerah yang Diterapkan Di Daerah	0%	30%	30%				60%



**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur**  
**yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2020-2023**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Hasil kelitbangan yang dihasilkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat	0%		23/88x100%	17/88x100%	24/88x100%	24/88x100%	100%
2	Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dalam mendukung pembangunan IKN	0%		1/11x100%	2/11x100%	4/11x100%	4/11x100%	100%

catatan : indikator kinerja dihitung dengan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah penelitian mengenai pembangunan dan kesra yang dihasilkan dalam tahun renja}}{\text{Jumlah penelitian mengenai pembangunan dan kesra yang dihasilkan hingga akhir periode renstra}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Jumlah penelitian mengenai IKN yang dihasilkan dalam tahun renja}}{\text{Jumlah penelitian mengenai IKN yang dihasilkan hingga akhir periode renstra}} \times 100\%$$


## BAB VIII

## PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 ini merupakan penyempurnaan dan penajaman target yang akan dicapai dalam rangka mendukung pencapaian visi Gubernur Kalimantan Timur yang tertuang dalam RPJMD 2019-2023.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra ini akan memerlukan komitmen, koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara para pihak agar seluruh sumber daya yang ada dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk dapat melaksanakan Renstra ini dengan baik, maka hal-hal yang sangat krusial untuk dilaksanakan setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

1. Seluruh insan Balitbangda berdasarkan hirarki kewenangan dan tupoksinya senantiasa bersungguh-sungguh untuk mencapai indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra, yang pada akhirnya bermuara kepada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur terkait fungsi penelitian dan pengembangan daerah.
2. Membuat Rencana Kerja (Renja) tahunan, sebagai bahan untuk pembuatan RKPD dan sebagai bahan evaluasi, dan membuat Rencana kerja Tahunan (RKT) untuk bahan pembuatan DPA sebagai kelanjutan dari RKPD.
3. Mensosialisasikan Perubahan Renstra ini kepada seluruh pegawai dan para pihak terkait Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Akhirnya, semoga Perubahan Renstra ini dapat menjadi pedoman bagi dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tiap tahunnya hingga akhir periode RPJMD di tahun 2023.